



**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS,  
DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TAX  
AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE*  
DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2013 – 2016**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Helmina Kurniaty

022114288

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
2018**

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, DAN  
KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA  
PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2013 – 2016**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, DAN  
KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA  
PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIGDE 2013 – 2016**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

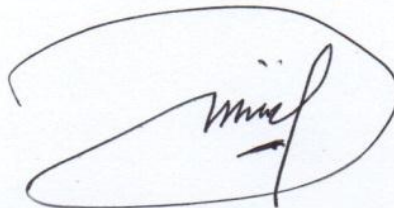
Pada Hari: Selasa, Tanggal: 31/07/2018

Helmina Kurniaty

022114288

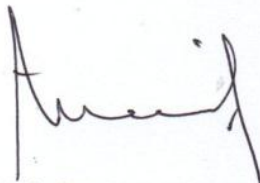
Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji



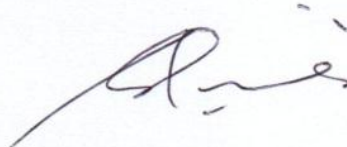
(Monang Situmorang, Ak., M.M., CA)

Ketua Komisi Pembimbing



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

Anggota Komisi Pembimbing



(Wiwik Budianti, S.E., Msi)

## ABSTRAK

Helmina Kurniaty. 022114288. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Food and Beverage* Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016. Dibawah Bimbingan Arief Tri Hardiyanto dan Wiwik Budianti. 2018.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal. Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *cash effective tax rate* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah proporsi komisaris independen dan komite audit sedangkan profitabilitas diprosikan dengan *return on asset* (ROA).

Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016 sehingga diperoleh 12 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website personal perusahaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Komisaris independen ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. 2) Komite Audit ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. 3) *Return on asset* ( $X_3$ ) secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. 4) Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. 5) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan komisaris independen, komite audit, *return on asset*, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Adapun saran yang diberikan penulis untuk perusahaan agar dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih baik agar dapat mengendalikan efisiensi jumlah pajak yang akan diberikan kepada pemerintah. Selain itu perusahaan juga agar dapat memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia dalam perusahaan mengenai undang-undang perpajakan terbaru agar karyawan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik dan benar. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan dapat menggunakan 11 cara pengukuran penghindaran pajak yang lainnya serta menambahkan periode penelitian juga memilih sektor perusahaan lain selain perusahaan *food and beverage*.

**Kata kunci** : komisaris independen, komite audit, profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, *tax avoidance*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, perlindungan dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Food and Beverage* di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2016”. Adapun penyusunan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Keberhasilan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
2. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA selaku ketua komisi pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan perhatian kepada penulis serta bimbingan, pengarahan dan juga masukan yang sangat bermanfaat selama melakukan penyusunan Skripsi.
5. Ibu Wiwik Budianti, SE., M.Si. selaku anggota komisi pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan perhatian kepada penulis serta bimbingan, pengarahan dan juga masukan yang sangat bermanfaat selama melakukan penyusunan Skripsi.
6. Para Dosen dan Struktural Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
7. Keluarga penulis, Bapak Helmud P. Simanjuntak, Ibu Tormina Siagian, Christian Regensius dan Alexander Febriyanto yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Sahabat-sahabat tercinta saya Aileen Belinda, Jessica Lestari, Gabrille Lee, Vivi Selviyani, Yesi Kristiana, Yunivira Yuwono, Danny Mulyono Gunawan,

Adinda Langlang Buana dan Hartadi Anggoro Pamungkas, yang selalu menemani, menghibur, membantu, mendoakan dan memberikan dukungan yang luar biasa sehingga penulis bersemangat dalam menuliskan tugas akhir ini.

9. Sahabat, Teman, Guru, Orang Teristimewa Lee Hyuk Jae, Kim Soo Hyun dan Lee Jong Suk yang selalu setia memberikan kasih sayang, menemani, membantu, mendoakan, motivasi, dan memberikan dukungan yang luar biasa dalam suka maupun duka.
10. Teman-teman seperjuangan “Keluarga Besar Akuntansi” (angkatan 2014) yang selama kurang lebih empat tahun bersama dan memberikan kenangan baik suka maupun duka dalam masa perkuliahan khususnya kelas G dan teman-teman satu dosen pembimbing.
11. Keluarga Besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Pakuan “Gita Simfoni Pakuan” yang telah menjadi tempat saya untuk mengasah kreativitas dan memberikan pengalaman serta kesan selama saya duduk di bangku kuliah.
12. Keluarga besar dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memotivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, karunia-Nya dan memberikan balasan atas kebaikan, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna sebagaimana yang diharapkan, untuk itu kritik maupun saran yang bersifat memperbaiki sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri juga pihak lain dan tidak lupa penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penyusunan Skripsi ini.

Bogor, Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2	Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	6
	1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian .....	6
	1.2.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3	Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
	1.3.1 Maksud Penelitian .....	7
	1.3.2 Tujuan Penelitian .....	7
1.4	Manfaat Penelitian .....	7
	1.4.1 Kegunaan Teoritik .....	7
	1.4.2 Kegunaan Praktek .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1	Studi Pustaka.....	9
	2.1.1 Teori Agensi .....	9
	2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i> .....	10
	2.1.2.1 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> .....	13
	2.1.2.2 Komisaris Independen .....	14
	2.1.2.3 Komite Audit .....	15
	2.1.3 Profitabilitas .....	16
	2.1.3.1 Pengertian Laba .....	16
	2.1.3.2 Jenis-jenis Laba .....	16
	2.1.3.3 Pengertian Profitabilitas .....	17
	2.1.3.4 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas .....	17
	2.1.3.5 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas .....	18
	2.1.4 Kompensasi Rugi Fiskal .....	19
	2.1.5 Pajak .....	19
	2.1.5.1 Definisi Pajak .....	19
	2.1.5.2 Jenis Pajak .....	20
	2.1.5.3 Asas Pemungutan Pajak .....	21
	2.1.6 <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak) .....	23
	2.1.6.1 Pengertian <i>Tax Avoidance</i> .....	23

2.2	Penelitian Terdahulu .....	27
2.3	Kerangka Pemikiran .....	29
2.3.1	Pengaruh Komiaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	29
2.3.2	Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	30
2.3.3	Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	30
2.3.4	Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	30
2.4	Hipotesis Penelitian .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	32
3.2.1	Objek Penelitian .....	32
3.2.2	Unit Analisis .....	32
3.2.3	Lokasi Penelitian .....	32
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	33
3.4	Operasionalisasi Variabel .....	33
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	34
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	35
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data .....	35
3.7.1	Statistik Deskriptif .....	36
3.7.2	Uji Asumsi Klasik .....	36
3.7.2.1	Uji Normalitas .....	36
3.7.2.2	Uji Multikolinearitas .....	36
3.7.2.3	Uji Autokorelasi .....	37
3.7.2.4	Heterokedastisitas .....	37
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda .....	38
3.7.4	Uji Hipotesis .....	38
3.7.4.1	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	38
3.7.4.2	Uji Statistik F (Secara Simultan) .....	39
3.7.4.3	Uji Statistik t (Secara Parsial) .....	39

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Pengumpulan Data .....	40
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia .....	41
4.1.2	Data Komisararis Independen, Komite Audit, <i>Return on Asset</i> (ROA) dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada 12 Perusahaan Sub Sektor <i>Food and Beverage</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016 .....	47
4.2	Analisis Data .....	58
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	58
4.2.2	Analisis Asumsi Klasik .....	59



4.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	64
4.2.4	Analisis Uji Hipotesis .....	66
4.3	Pembahasan.....	69
4.3.1	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Return on Asset</i> , dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	69
4.4	Interpretasi Hasil Penelitian .....	71
4.4.1	Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	71
4.4.2	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	72
4.4.3	Pengaruh Profitabilitas ( <i>Return on Asset</i> ) terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	73
4.4.4	Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	73

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Simpulan .....	75
5.2	Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data <i>Cash Effective Tax Rate</i> Perusahaan <i>Food and Beverage</i> yang Terdaftar di BEI.....	2
Tabel 2	Cara Pengukuran <i>Tax Avoidance</i> .....	25
Tabel 3	Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 4	Nama Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian.....	33
Tabel 5	Operasionalisasi Variabel dan Skala Pengukurannya.....	34
Tabel 6	Kriteria Perusahaan yang Menjadi Sampel.....	40
Tabel 7	Daftar Nama Perusahaan Sub Sektor <i>Food and Beverage</i> yang Menjadi Objek Penelitian .....	41
Tabel 8	Komisaris Independen Perusahaan Sub Sektor <i>Food and Beverage</i> Periode 2013-2016.....	48
Tabel 9	Komite Audit Perusahaan Sub Sektor <i>Food and Beverage</i> Periode 2013-2016 .....	50
Tabel 10	<i>Return on Asset</i> Perusahaan Sub Sektor <i>Food and Beverage</i> Periode 2013-2016 .....	53
Tabel 11	Kompensasi Rugi Fiskal Perusahaan Sub Sektor <i>Food and Beverage</i> Periode 2013-2016.....	54
Tabel 12	<i>Cash Effective Tax Rate</i> Perusahaan Sub Sektor <i>Food and Beverage</i> Periode 2013-2016.....	57
Tabel 13	Analisis Statistik Deskriptif .....	58
Tabel 14	Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i> Sebelum Outlier.....	59
Tabel 15	Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i> Setelah Outlier .....	60
Tabel 16	Uji Multikolinearitas .....	62
Tabel 17	Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 18	Hasil Uji Glejser.....	63
Tabel 19	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel 20	Uji Koefisien Determinasi .....	67
Tabel 21	Uji Statistik F .....	67
Tabel 22	Uji Statistik t .....	68
Tabel 23	Hasil Pengujian Hipotesis .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Representasi Data <i>Cash Effective Tax Rate</i> Perusahaan <i>Food and Beverage</i> .....	3
Gambar 2 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 3 Komisaris Independen Perusahaan <i>Food and Beverage</i> Periode 2013-2016 .....	47
Gambar 4 Komite Audit Perusahaan <i>Food and Beverage</i> Periode 2013-2016 .....	50
Gambar 5 <i>Return on Asset</i> Perusahaan <i>Food and Beverage</i> Periode 2013-2016 .....	52
Gambar 6 <i>Cash Effective Tax Rate</i> Perusahaan <i>Food and Beverage</i> Periode 2013-2016.....	56
Gambar 7 <i>Normal Probability Plot-Cash Effective Tax Rate (CETR)</i> .....	61
Gambar 8 Hasil Uji Normalitas Histogram- <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i> .....	61
Gambar 9 Pola Titik-titik Pada Scatterplots .....	64



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara termasuk Indonesia. Pengertian pajak dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam akuntansi, pajak merupakan beban atau biaya yang mengurangi laba bersih, sedangkan hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari entitas bisnis yaitu memperoleh laba yang besar agar nilai saham perusahaan meningkat dan perusahaan semakin diminati oleh pihak investor. Akibat dari perbedaan tersebut, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan melakukan manajemen pajak tanpa melanggar undang-undang. Ada tiga langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan. Langkah yang pertama adalah perusahaan berusaha untuk menghindari pajak secara legal maupun ilegal. Langkah kedua perusahaan berusaha untuk mengurangi pajak secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga yaitu apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut (Siahaan, 2010).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak seringkali dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) dimana keduanya merupakan cara yang dilegalkan untuk menghindari atau bahkan menghilangkan pembayaran pajak. Akan tetapi perencanaan pajak tidak diperdebatkan keabsahannya sedangkan penghindaran pajak merupakan hal yang dianggap sebagai tindakan yang merugikan karena dapat mengurangi pendapatan negara.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yaitu *corporate governance*, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal. *Corporate governance* dalam suatu perusahaan berfungsi sebagai pengawas kinerja pengelola agar tata kelola perusahaan dalam bidang perpajakan tetap berada dalam koridor yang legal. *Corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen adalah seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali dan memiliki peranan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris. Sedangkan komite audit adalah

pihak yang melakukan pengawasan dalam proses pembuatan laporan keuangan untuk menghindari terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Apabila perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan mendapatkan perhatian yang luas dari kalangan masyarakat dan pemerintah sebagai regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis yang tinggi, salah satunya pengenaan pajak yang lebih tinggi (Nursari dkk, 2017 ). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari jumlah seluruh aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut.

Selain faktor komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas, kompensasi rugi fiskal juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal adalah keadaan dimana perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak dan akan dikompensasi pada masa pajak berikutnya. Kerugian yang dialami perusahaan dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi tersebut. Akibat yang ditimbulkan ialah, selama lima tahun perusahaan akan diberikan keringanan untuk tidak dibebankan pajak.

Penghindaran pajak pada umumnya banyak dilakukan oleh korporasi besar. Dalam melakukan tindak penghindaran pajak, perusahaan akan merancang secara sistematis skema-skema transaksi yang kompleks. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan persepsi ketidakadilan di mana korporasi besar akan membayar pajak lebih sedikit (Romauli, 2017).

Berdasarkan laporan keuangan dari 12 perusahaan *food and beverage* periode 2013-2016 diperoleh data sebagai berikut :

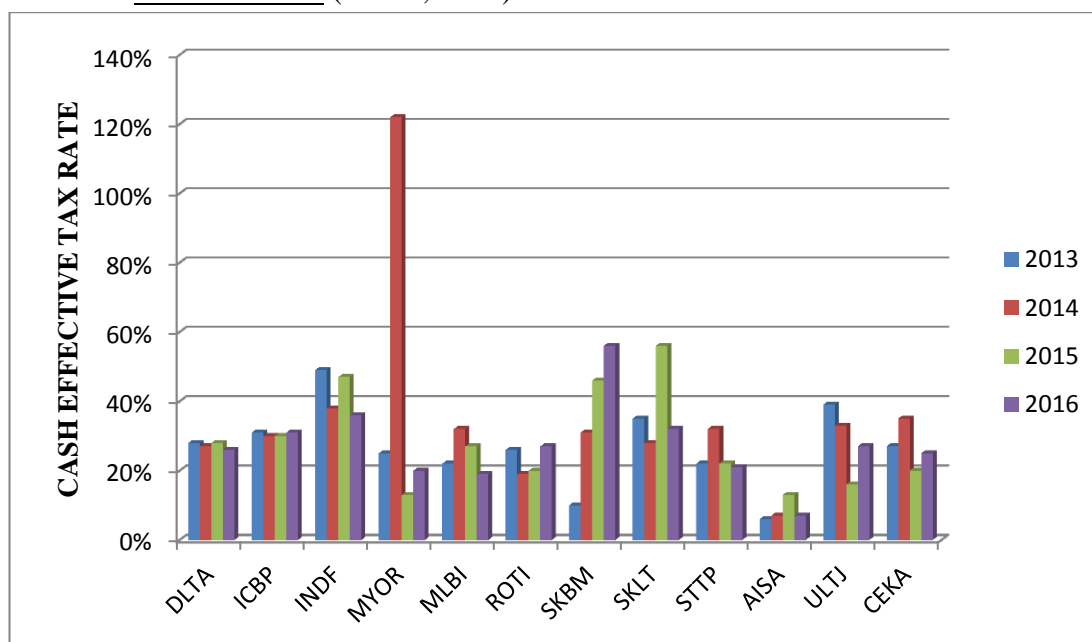
Tabel 1.

Data *Cash Effective Tax Rate* Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di BEI

Kode Perusahaan	<i>Cash Effective Tax Rate</i>			
	2013	2014	2015	2016
DLTA	0,28	0,27	0,28	0,26
ICBP	0,31	0,30	0,30	0,31
INDF	0,49	0,38	0,47	0,36
MYOR	0,25	1,22	0,13	0,20
MLBI	0,22	0,32	0,27	0,19
ROTI	0,26	0,19	0,20	0,27
SKBM	0,10	0,31	0,46	0,56
SKLT	0,35	0,28	0,56	0,32

STTP	0,22	0,32	0,22	0,21
AISA	0,06	0,07	0,13	0,07
ULTJ	0,39	0,33	0,16	0,27
CEKA	0,27	0,35	0,20	0,25

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (diolah, 2018)



Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (diolah, 2018).

Gambar 1.

#### Representasi Data CETR Perusahaan *Food and Beverages* yang Terdaftar di BEI

Berdasarkan data di atas, CETR dari perusahaan DLTA mengalami fluktuasi penurunan dari tahun 2013-2016 dengan rata-rata sebesar 0,67%. CETR pada perusahaan ICBP cenderung stabil. CETR pada INDF mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunan sebesar 4,33%. Pada perusahaan MYOR, CETR mengalami fluktuasi penurunan sebesar rata-rata 1,67%. Pada perusahaan MLBI, CETR mengalami fluktuasi penurunan rata-rata sebesar 1,00%. Pada perusahaan ROTI, CETR mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,33%. CETR pada SKBM mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,33%. CETR dari perusahaan SKLT mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunan sebesar 1,00%. Pada perusahaan STTP, CETR mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunan sebesar 0,33%. Pada perusahaan AISA, CETR mengalami fluktuasi kenaikan rata-rata sebesar 0,33%. CETR pada perusahaan ULTJ mengalami fluktuasi penurunan rata-rata sebesar 4,00%. Pada perusahaan CEKA, CETR mengalami fluktuasi penurunan sebesar rata-rata 0,67%.

Salah satu contoh penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia adalah kasus PT RNI, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan dan terafiliasi dengan perusahaan di Singapura. Menteri keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan bahwa PT RNI sudah terdaftar sebagai

perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang dan utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban perpajakan. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar dan kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Contoh kasus selanjutnya adalah kasus *Panama Papers*. Kasus ini merupakan kasus bocornya dokumen pada tahun 2016 yang mengulas jutaan dokumen finansial yang mengungkap perusahaan di kawasan bebas pajak (*offshore*) milik orang kaya di seluruh dunia. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (*shell company*) yang terdaftar di 21 negara surga pajak (*tax havens countries*) diungkap dalam bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah tersebut. Laporan *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum superkaya melindungi (menyembunyikan) kekayaannya melalui pendirian perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak. Banyak pula perusahaan Indonesia yang terlibat dalam kasus ini. Ada tiga kategori perusahaan yang terlibat dalam kasus ini yaitu yang pertama, 17 perusahaan masuk jenis *officers & master clients*. Kategori kedua adalah *offshore entities* menginduk pada korporasi asal Indonesia, jumlahnya 41 unit. Kategori ketiga adalah data yang menunjukkan perusahaan terdaftar menanamkan modal di negara-negara surga pajak, melalui bantuan Mossack Fonseca. Jumlahnya mencapai 2.190 alamat usaha ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Selain kasus PT RNI dan kasus Panama Papers, ada juga kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor perikanan di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari subsektor perikanan masih belum optimal. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa modus pelaku usaha untuk menghindari kewajiban perpajakan antara lain melaporkan jumlah dan harga kapal dengan *under value*, melaporkan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan tidak melaporkan pendapatan dengan tidak benar ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Untuk kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman terjadi pada perusahaan PT Coca Cola Indonesia yang diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Biaya tersebut dikeluarkan untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena



pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Menurut penuturan Edward Sianipar sebagai perwakilan DJP, biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. (www.kompas.com)

Beberapa fenomena diatas menunjukkan bahwa banyak perusahaan besar yang melakukan tindakan penghindaran pajak di Indonesia sebagai upaya untuk memperkecil beban pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun analisis dari penelitian yang peneliti replikasi dari judul penelitian Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Penulis dari penelitian ini adalah Sri Romauli (2017). Lokasi penelitian sendiri diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun data penelitian adalah tahun 2010-2014. Populasi penelitian Sri Romauli (2017) adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu sebanyak 41 perusahaan. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 13 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik sampling dengan menggunakan metode purposive (*judgement sampling*) dengan kriteria: perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.

Hasil penelitian Sri Romauli (2017) adalah hasil uji parsial. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Uji parsial *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan kontribusi. Uji parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan kontribusi. Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan kontribusi dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan kontribusi.

Perbedaan dengan penelitian yang direplikasi adalah: penulis mengganti variabel independen *leverage* dengan kompensasi rugi fiskal. Selain itu populasi penelitian tersebut menggunakan perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penulis mengambil populasi dari perusahaan sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena perusahaan ini merupakan sektor penyumbang dan pemicu utama dalam

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri *food and beverage* sangat di butuhkan karena semakin hari semakin terjadi peningkatan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia selain itu makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food and Beverage Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

1. Komisaris tidak bersikap independen terhadap kepentingan manajemen ataupun pemegang saham.
2. Adanya kemungkinan terjadinya keberpihakan terhadap salah satu pemegang saham atau pihak-pihak lain yang terkait yang dilakukan oleh komisaris independen.
3. Komite audit memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi tentang perpajakan sehingga dapat mencari celah untuk menghindari pajak.
4. Memungkinkan terjadinya kerjasama yang dilakukan pihak komite audit dengan pihak manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*.
5. Perusahaan cenderung menginginkan laba bersih yang besar sehingga melakukan penghindaran pajak.
6. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi berkesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.
7. Kompensasi rugi fiskal dapat mendorong perusahaan untuk melakukan kecurangan.
8. Kompensasi rugi fiskal membuat pengusaha memiliki kesempatan untuk memainkan pajak.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kompensasi secara parsial rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

5. Apakah komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Untuk menganalisis hubungan antara komisaris independen, komite audit, profitabilitas, kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang telah disusun diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara komisaris independen dengan *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara komite audit dengan *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara kompensasi rugi fiskal dengan *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis apakah komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktek, yaitu:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritik**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu yang sudah ada dan memberikan wawasan baru bagi pembacanya mengenai seberapa besar pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktek**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan praktek dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

- a. Komisaris independen digunakan sebagai media untuk mengetahui jumlah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan terhadap jumlah seluruh dewan komisaris.
- b. Profitabilitas digunakan sebagai media untuk mengetahui seberapa besar laba/keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan.
- c. Kompensasi rugi fiskal digunakan sebagai media untuk mengetahui selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
- d. *Tax avoidance* digunakan sebagai media untuk mengetahui seberapa besar upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana karakteristik perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak sehingga para investor dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan menanamkan modalnya pada suatu entitas bisnis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Studi Pustaka

#### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *corporate governance*. Teori keagenan mengemukakan hubungan antara *principle* (pemilik) dan *agent* (manajer) dalam pengelolaan perusahaan, *principle* merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak *agent* (manajemen) (Romauli, 2017).

Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara *agent* (manajemen) dengan *principal* (pemilik) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Eisenhardt (1989) yang dialihbahasakan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*);
- (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*);
- (3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya yaitu mendapatkan bonus.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham) (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Manajer seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali dalam Sulistiani, 2013).

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Lisa, 2015).

Jensen dan Meckling dalam Sulistiani (2013) berpendapat bahwa *agency conflict* timbul pada berbagai hal sebagai berikut:

- a. Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan;
- b. Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif atau disebut *earning retention*;
- c. Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkauan kemampuan manajer;
- d. Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cash flow* perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi.

Eugene F. Brigham dan Joel Houston (2001) mengemukakan bahwa, permasalahan agen yang potensial ini muncul ketika manajer perusahaan memiliki kurang dari 100 persen saham perusahaan. Jika perusahaan dikelola sebagai perusahaan perorangan oleh pemiliknya, maka manajer/pemilik akan menjalankan perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Pada kebanyakan perseroan besar, konflik agen yang potensial ini sangat penting, karena manajer perusahaan besar umumnya hanya memiliki saham dalam persentase kecil. Dalam situasi ini, maksimisasi kekayaan pemegang saham akan mengambil tempat di bagian belakang, jika muncul konflik dengan tujuan manajer.

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

### **2.1.2 Good Corporate Governance**

Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak agen dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan prinsipal. Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Mekanisme *corporate governance* memiliki kemampuan dalam

kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba (Boediono, 2005).

*Corporate governance* (CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas (Johnson dkk dalam Sari, 2014).

*Corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer dalam Winata, 2014)

Komite Nasional Kebijakan Governance (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) merumuskan bahwa *corporate governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan guna memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi perusahaan dan memiliki tujuan untuk meminimalkan konflik keagenan di dalam perusahaan.

Priambodo dan Suprayitno dalam Romauli (2017), menjelaskan manfaat-manfaat dari penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya suatu masalah.
2. Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka waktu yang lama.
3. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan.

Komite nasional kebijakan *Governance* atau KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

1. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan acara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan yang harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Kewajaran (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk mewujudkan *corporate governance* yang baik, prinsip-prinsip tersebut harus dicapai dengan kerjasama yang baik dengan pihak di dalam maupun di luar perusahaan karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003). *Corporate governance* merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis.

Keberhasilan penerapan GCG tidak terlepas dari unsur yang terdapat di dalamnya yakni internal dan eksternal perusahaan, hal ini dinyatakan oleh (Sutedi, 2012, 41-42), bahwa unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



1. Internal Perusahaan:
  - a. Pemegang saham
  - b. Manajer
  - c. Dewan Direksi
  - d. Dewan Komisaris
  - e. Karyawan
  - f. Sistem remunerasi
  - g. Komite audit perusahaan
2. Eksternal Perusahaan:
  - a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
  - b. Investor
  - c. Institut penyedia informasi
  - d. Akuntan publik
  - e. Institut yang memihak kepentingan publik bukan golongan
  - f. Pemberian pinjaman
  - g. Lembaga yang mengesahkan legalit

Unsur-unsur *Good Corporate Governance* tersebut harus ada dalam perusahaan yang akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, dalam pelaksanaannya maka harus dibentuk melalui baik internal maupun eksternal perusahaan. Unsur internal perusahaan merupakan sesuatu yang bisa mengontrol kinerja manajemen dalam melaksanakan kegiatannya, sedangkan unsur dari luar perusahaan merupakan alat acuan dan kontrol bagi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. (Wibawa dkk, 2016)

#### **2.1.2.1 Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme *corporate governance* diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut (Hanggraeni, 2014, 61). Mekanisme ini memonitoring aktivitas perusahaan agar tindakan manajerial (*agent*) sejalan dengan tujuan perusahaan (*principal*) yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya mekanisme CG diharapkan dapat memperkuat (memperlemah) hubungan positif (negatif) perencanaan pajak dengan nilai perusahaan (Romauli, 2017).

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998), mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. *Internal mechanism* (mekanisme internal), seperti srtuktur dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif.
2. *External mechanism* (mekanisme eksternal), seperti pasar untuk control perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan hutang.

Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisaris independen dan komite audit.

### 2.1.2.2 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Ginting, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, anggota direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Rosalia, 2017).

Jumlah komisaris independen yang proporsional yaitu dengan jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) (Pohan, 2008).

Misi dari dewan komisaris independen menurut Sutrisno (2010) yaitu:

- (1) Mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.
- (2) Mendorong diterapkannya prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan di Indonesia.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam Praditia (2010), menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
4. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

5. Tidak menjadi *partner* atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
6. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
7. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Menurut Rachmithasari (2015), proksi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

### 2.1.2.3 Komite Audit

Komite audit memiliki peranan penting dalam suatu organ perusahaan yang harus ada dalam penerapan *good corporate governance*. Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit.

Komite audit sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak tiga orang dan diketuai oleh seorang komisaris independen serta beranggotakan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Subagiastra, Arizona, dan Mahaputra, 2016). Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen (Pohan, 2008).

Tujuan pembentukan komite audit menurut Sandy dan Lukviarman (2015) adalah:

- a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum;
- b. Memastikan bahwa kontrol internalnya memadai;
- c. Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya;
- d. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Komite audit memiliki tanggung jawab dalam bidang *corporate governance* yaitu untuk memastikan, bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, mengutamakan etika dalam melakukan usaha, melakukan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Fadhilah, 2014).

Komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga nantinya akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Macfoez, 2006).

Pengukuran komite audit dalam Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), yaitu:

$$\sum \text{Komite Audit} \times 100\%$$

### 2.1.3 Profitabilitas

#### 2.1.3.1 Pengertian Laba

Laba adalah hal yang mendasar dan penting dari laporan keuangan dan memiliki banyak kegunaan di berbagai konteks. Menurut Prawinegoro (2008, 121) laba memiliki pengertian yaitu prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*expenses*).

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007, 304) "Laba akuntansi adalah perbedaan revenue antara *revenue* yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut".

Laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut (Yocelyn dan Christiawan, 2012, 83).

Menurut Belkaoui (2007, 226), laba umumnya dipandang sebagai:

1. Dasar untuk perpajakan;
2. Penentu dari kebijakan pembayaran dividen;
3. Panduan dalam melakukan investasi dan pengambilan keputusan;
4. Satu elemen dalam peramalan.

#### 2.1.3.2 Jenis-jenis laba

Menurut Kasmir (2011, 303), jenis laba adalah sebagai berikut:

1. Laba Kotor (*Gross Profit*)  
Merupakan laba yang diperoleh sebelumnya dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba Bersih (*Net Profit*)  
Merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

### 2.1.3.3 Pengertian Profitabilitas

Pengertian profitabilitas menurut Hanafi dan Halim (2012, 81) yaitu bahwa profitabilitas merupakan alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu.

Adapun pengertian profitabilitas menurut Kasmir (2014) yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas maka profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting dalam kelangsungan hidup perusahaan, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*).

Tanpa adanya keuntungan (*profit*), maka akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan, dan terutama sekali dari pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan karena disadari benar betapa pentingnya arti dari *profit* terhadap kelangsungan dan masa depan perusahaan (Romauli, 2017).

Menurut Rodriguez dan Arias (2013), profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan yang rendah atau mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali.

### 2.1.3.4 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Sama halnya dengan rasio-rasio lain, profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, bukan hanya bagi pihak pemilik usaha dan manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi tersebut menjadi lebih berarti (Samryn, 2012, 417).

Menurut Kasmir (2014) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu,
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sedangkan manfaat yang diperoleh menurut Kasmir (2014) adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

### **2.1.3.5 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas**

Terdapat beberapa pengukuran tingkat profitabilitas di mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Hasil pengukuran tersebut dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen (Romauli, 2017).

Menurut Kasmir (2014) ada lima jenis rasio profitabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Profit margin (*Profit Margin on Sales*)
2. *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Total Assets* (ROA)
3. *Return on Equity* (ROE)
4. Laba Per Lembar Saham
5. Rasio Pertumbuhan

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Total Assets* (ROA). Agusti (2014) menyatakan bahwa ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun modal pinjaman dan semakin tinggi ROA yang dihasilkan, maka akan meningkatkan laba perusahaan.

Demikian juga Saputra dan Asyik (2017, 3) menyatakan bahwa ROA adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.

Fahmi (2011, 137) menyatakan bahwa rasio profitabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Menurut Waruwu (2017), rasio profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

*Return on asset* yang positif menunjukkan bahwa dari aktiva yang dipergunakan untuk operasional perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *return on asset* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan perusahaan mendapatkan kerugian.

#### **2.1.4 Kompensasi Rugi Fiskal**

Kompensasi kerugian fiskal diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2). Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial
2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma perhitungan.
5. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

#### **2.1.5 Pajak**

##### **2.1.5.1 Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Judisseno (2005, 14) yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut N. J. Feldmann dalam Resmi (2016, 1) menyatakan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dan nantinya digunakan pemerintah untuk pembangunan negara.

### **2.1.5.2 Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2016, 7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Menurut Golongan
2. Menurut Sifat
3. Menurut Lembaga Pemungut

Adapun penjelasan dari ketiga jenis pajak tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya:

Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, berikut penjelasannya:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dapat dilihat dari 3 (tiga) unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Adapun ketiga unsur tersebut yaitu:

- a. Penanggungjawab Pajak

Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

- b. Penanggung Pajak

Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.

- c. Pemikul Pajak

Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.



Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

#### 1. Menurut Sifatnya

Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, berikut penjelasannya:

- a. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak dan tempat tinggal.

#### 2. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak negara dan pajak daerah, berikut penjelasannya:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### 2.1.5.3 Asas Pemungutan Pajak

Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternatif pemungutan pajak harus dipegang teguh asas-asas pemungutan pajak. Adapun asas pemungutan yang terkenal dikemukakan oleh Adam Smith yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* adalah sebagai berikut:

1. *Equality*, ialah pemungutan pajak yang bersifat final, adil, dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. *Certainty*, ialah penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang tetapi wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*, ialah pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.
4. *Economy*, ialah biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Asas keadilan, adalah asas yang dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam *Public Finance in Theory and Practice* yang dimuat dalam modul brevet IAI (2016), terdiri dari dua macam asas keadilan, yaitu:

1. *Benefit Principle*, yaitu setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.
2. *Ability Principle*, yaitu pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayar.

Perbedaan lainnya masalah keadilan dalam pemungutan pajak adalah:

1. Keadilan Horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
2. Keadilan Vertikal, yaitu bila orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama.

Menurut Mansyury dalam modul brevet IAI (2016) agar pajak penghasilan sesuai dengan asas keadilan, diperlukan:

1. Syarat Keadilan Horizontal
  - a. Definisi penghasilan, yaitu semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk dalam definisi penghasilan.
  - b. *Globality*, yaitu seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan kemampuan untuk membayar sehingga penghasilan dijumlahkan sebagai satu objek pajak.
  - c. *Net Income, Ability to Pay*, yaitu jumlah neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  - d. *Personal Exemption*, yaitu pengurangan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
  - e. *Equal Treatment for the equals*, yaitu pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
2. Syarat Keadilan Vertikal
  - a. *Unequal Treatment for the Equals* yaitu besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).
  - b. *Progression* yaitu wajib pajak yang penghasilannya besar harus membayar pajak yang besar dengan prosentase tarif besar.

## 2.1.6 Tax Avoidance (PENGHINDARAN PAJAK)

### 2.1.6.1 Pengertian Tax Avoidance

Menurut Suandy (2008, 8), “PENGHINDARAN pajak adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). PENGHINDARAN pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.”

Sedangkan menurut Dyreng, et. al (2010), “PENGHINDARAN pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh wajib pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tindak hukum pajak.”

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak karena masih berada dalam ketentuan perpajakan sehingga diperbolehkan pelaksanaannya secara hukum (*legal*).

PENGHINDARAN pajak adalah bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Suandy (2008, 6), tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Sari, 2014).

Skema *tax avoidance* di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam [www.ortax.org](http://www.ortax.org), dibedakan menjadi dua yaitu:

1. PENGHINDARAN pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*),
2. PENGHINDARAN pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Perbedaan kedua jenis *tax avoidance* ini diungkapkan oleh Slamet dalam Rusydi dan Mantani (2014) yaitu:

1. Ada atau tidaknya tujuan usaha yang baik.
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan.
3. Apakah tindakan sesuai atau tidak dengan *spirit and intention of parliament* (jiwa dan maksud dari pemerintah).
4. Apakah melakukan atau tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (Spitz, 1983 dalam Surbakti, 2012) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991).

Menurut Sumarsan (2013, 118) terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak yaitu:

1. Menahan diri  
Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.
2. Lokasi terpencil  
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

Di penelitian Hoque, *et al.* dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

- 1) Menampakkkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Menurut John Hutagaol (2007, 154) ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk berani melakukan praktik penghindaran pajak, yaitu:

1. Kesempatan (*Opportunities*)
2. Lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*)
3. Manfaat dan biaya (*Cost and Benefits*)
4. Kecil kemungkinan perbuatannya terungkap (*Level of Detections*)
5. Pengenaan sanksi pajak tidak berat (*Level of Penalty*)

6. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*Negotiated Settlement*)

Uppal dalam Romauli (2017) menyatakan bahwa “... di Negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara.”

Sartori (2008, 12) dalam Tandean (2015) menegaskan bahwa konsep *tax avoidance* merupakan sebuah konsep terhadap perlindungan pajak (*tax shield*). Pengertian secara luas mengenai konsep ini adalah sebuah transaksi atau perjanjian yang dirancang untuk mengurangi atau menunda perpajakan dengan cara – cara tertentu.

Terdapat banyak alat ukur di dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya ada dua belas cara perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), yang disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.  
Cara Pengukuran *Tax Avoidance*

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax income
2.	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3.	Cash ETR (CETR)	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4.	Long-run cash ETR	$\frac{\sum \text{Worldwide cash taxes paid}}{\sum \text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earning over and years

5.	ETR <i>Differential</i>	<i>Statutory ETR - GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6.	DTAX	<i>Error term form the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a+bx Control+e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7.	<i>Total</i> BTD	<i>Total Different Book – Tax Total Asset</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8.	<i>Temporary</i> BTB	<i>Deffered tax expense/U.S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9.	<i>Abnormal</i> <i>total</i> BTB	<i>Residual from BTB/Tait=<math>\beta</math>Tait+<math>\beta</math>mi</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10.	<i>Unrecognized</i> <i>tax</i> benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11.	<i>Tax shelter</i> <i>activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax</i> <i>rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : Hanlon dan Heitzman

Dalam penelitian ini *tax avoidance* menggunakan formula dari Dyreng, et.al, (2010), yaitu *Cash Effective Tax Rate (ETR)*. *Cash ETR* baik digunakan untuk "...menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan

atau perlindungan pajak. Selain itu, pengukuran *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wirna Yola (2014)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> yang diukur dengan DER dan <i>corporate governance</i> yang diukur dengan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Gusti Maya Sari (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Calvin Singly, I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax</i>

			<p><i>avoidance</i>. Sementara <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
4	Vivi Adeyani Tandean (2015)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
5	Suriani Ginting (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating	<p><i>Corporate governance</i> dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional, dan kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.</p>



6	Moses Dicky Refa Saputra, Nur Fadrijh Asyik (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> yang diukur dengan DER memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit dan profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Sri Romauli (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Leverage</i> , Komisaris Independen dan Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan kontribusi.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

#### 2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Jumlah komisaris independen yang proporsional yaitu sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris (Pohan, 2008). Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi (Winata, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian Feranika (2014), Winata (2014), dan Marfiah & Syam (2016) yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

### 2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

BEI menetapkan aturan bahwa perusahaan setidaknya memiliki tiga orang anggota komite audit, jika anggotanya kurang dari tiga maka hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak yaitu tindakan yang memiliki tujuan utama untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fadhilah (2014), Wibawa, Wilopo & Abdillah (2016), dan Tandean (2015), yang menunjukkan bahwa komite audit perusahaan memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

### 2.3.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa perusahaan (Saputra dkk, 2016). Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin baik kinerja perusahaan dalam menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Laba yang meningkat berakibat pada ROA yang juga meningkat (Annisa, 2017). Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan pihak manajemen (Romauli, 2017).

Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yola (2014), Rinaldi & Charoline Cheisviyanny (2015) dan Darmawan (2014) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

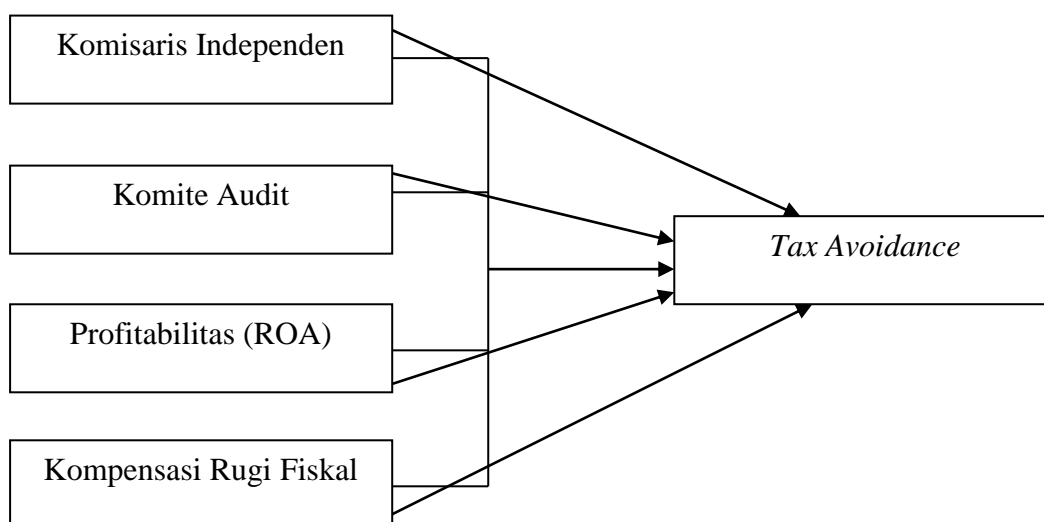
### 2.3.4 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang artinya adalah jika penghasilan bruto suatu perusahaan atau Wajib Pajak setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat

kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Dalam *agency theory* pihak manajemen (*agent*) lebih mementingkan pembayaran pajak yang lebih kecil. Sehingga kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ginting (2016), Tommy Kurniasih & Maria M. Sari (2013), dan Zamhuri (2016) bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian (hubungan dua variabel atau lebih) yang dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini digambarkan pada model konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.  
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H<sub>2</sub>: Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H<sub>3</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H<sub>4</sub>: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H<sub>5</sub>: Komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey*. Metode penelitian *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Pada penelitian ini, penulis meneliti pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal yang *listing* di Bursa Efek Indonesia terhadap *tax avoidance*.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian variabel X adalah *corporate governance*, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal sedangkan untuk variabel Y adalah *tax avoidance*. Indikator yang digunakan untuk masing-masing variabel diantaranya adalah variabel X *corporate governance* diukur menggunakan indikator komisaris independen dan komite audit, profitabilitas yang diukur menggunakan indikator *return on assets* (ROA), dan kompensasi rugi fiskal diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, sedangkan untuk variabel Y yaitu *tax avoidance* diukur dengan menggunakan indikator *cash effective tax rate* (CETR).

##### **3.2.2 Unit Analisis**

Unit analisis yang digunakan adalah *organization*, karena penelitian ini merupakan penelitian mengenai suatu organisasi atau perusahaan yang terdapat dalam perusahaan manufaktur sektor *food and beverage*.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor *food and beverage* sebagai lokasi untuk melakukan observasi. Untuk beberapa perusahaan yang data laporan keuangannya tidak lengkap atau tidak tercantum dalam situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), penulis memperolehnya dari situs atau *website* perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Adapun perusahaan *food and beverages* yang diteliti yaitu 12 perusahaan dari 16 perusahaan yang ditentukan oleh kriteria yang diajukan peneliti. Perusahaan yang diteliti antara lain :

Tabel 4.  
Nama-nama Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
2	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
3	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
4	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
5	MLBI	PT Multi Bintang Tbk
6	ROTI	PT Nippon Indosari Tbk
7	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk
8	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
9	STTP	PT Siantar Top Tbk
10	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera
11	ULTJ	PT Ultrajaya Tbk
12	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (diolah, 2018).

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka. Penulis akan menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan telah diolah pihak lain. Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter yang berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan *food and beverages* yang *listed* di BEI selama periode 2013-2016. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari website BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta website personal perusahaan yang akan diteliti. Data lainnya diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber-sumber literatur lainnya yang didapat peneliti dari studi pustaka dan menelaah penelitian sebelumnya.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai yang ditetapkan dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan proses analisa, maka penulis akan mengklasifikasikan variabel-variabel kedalam dua kelompok, yaitu:

#### 1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain atau variabel yang diduga sebagai akibat. Setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen, maka variabel dependen dapat terpengaruh atas perubahan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *corporate governance*, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal. *Corporate governance* diukur dengan menggunakan proksi komisaris independen dan komite audit. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio *return on asset* (ROA).

Sedangkan untuk kompensasi rugi fiskal menggunakan indikator variabel *dummy* yaitu dengan memberikan nilai 1 apabila perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal pada periode penelitian dan nilai 0 apabila perusahaan tidak memiliki kompensasi rugi fiskal pada periode penelitian.

## 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang diduga sebagai akibat. Besarnya perubahan yang disebabkan oleh variabel independen ini akan memberi peluang terhadap perubahan variabel dependen (terikat) sebesar koefisien perubahan dalam variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang diukur dengan menggunakan rasio *cash effective tax rate* (CETR).

Tabel 5.

### Operasionalisasi Variabel dan Skala Pengukurannya

Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI)

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Corporate Governance</i> (Independent Variable/ $X$ )	• Komisaris Independen ( $X_1$ )	<b>Komisaris Independen</b> $= \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
	• Komite Audit ( $X_2$ )	$\Sigma$ <b>Jumlah Komite Audit</b> X 100%	Ordinal
Profitabilitas (Independent Variable/ $X_3$ )	• <i>Return on Assets</i>	<b>ROA</b> = $\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
Kompensasi Rugi Fiskal (Independent Variable/ $X_4$ )	• Kompensasi Rugi Fiskal	Nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t.	Nominal
Penghindaran Pajak (Dependent Variable/ $Y$ )	• <i>Cash Effective Tax Rate</i>	<b>CETR</b> $= \frac{\text{Jumlah Kas Yang Dibayarkan Untuk Pajak}}{\text{Laba Akuntansi Sebelum Pajak}}$	Rasio

## 3.5 Metode Penarikan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap menggambarkan populasinya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*).

Metode *judgement sampling* atau *purposive* merupakan pengumpulan data berdasarkan atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (Hamid, 2012 dalam Oktofian, 2015). Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria tertentu.

Adapun kriteria pertimbangan dalam pemilihan sampel penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016
2. Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya selama tahun 2013-2016.
3. Data yang dilampirkan dalam laporan keuangan lebih lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
4. Laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.
5. Perusahaan yang menyampaikan laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2013-2016.
6. Perusahaan dengan nilai laba positif agar tidak mengakibatkan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) terdistorsi (Kurniasih & Sari, 2013)
7. Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* kurang dari satu, agar tidak membuat masalah dalam estimasi model (Kurniasih dan Sari, 2013).

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat dan mendownload laporan keuangan tersebut untuk periode 2013-2016 perusahaan manufaktur sektor industri *food and beverage* yang dipublikasikan oleh perusahaan sampel melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), web-web resmi perusahaan sampel, [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) dan dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik. Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, koran, majalah dan sebagainya.

### **3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data**

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti, dihitung melalui serangkaian tahapan guna mendukung hipotesis yang telah diajukan. Dalam mengolah data penelitian, peneliti menggunakan aplikasi *Statistic Product Service Solution* (SPSS) versi 23. Program ini sudah sangat populer dan banyak

penggunaannya, baik untuk penelitian umum, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya (Duwi Priyatno, 2012).

### 3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, dan sum (Duwi Priyatno, 2012). Pengujian ini akan mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel. Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data (Ghozali, 2013).

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Jika data yang digunakan telah dikumpulkan dan sudah memenuhi seluruh kriteria asumsi klasik, maka data yang ada termasuk dalam kategori data yang baik (Ghozali, 2013).

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu (1) Analisis Grafik, metode yang handal adalah melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2013). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. (2) Analisis Statistik, uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) untuk mendeteksi normalitas melalui pengamatan nilai residual. Kelebihan dari pengujian ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan persepsi antara satu pengamat dengan pengamat lainnya yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. *Level of-significant* yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya.

#### 3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model. Adanya kemiripan yang dimiliki antar variabel dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain.



Model regresi penelitian ini mengikuti suatu cara menurut Ghazali (2013), yaitu dengan melihat nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *variance inflation factor* (VIF)  $< 10$ . Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Begitupula sebaliknya, apabila nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai *variance inflation factor* (VIF)  $> 10$  maka diasumsikan bahwa adanya multikolinearitas.

### 3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul akibat dari residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik yaitu regresi yang terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013). Masalah autokorelasi dalam penelitian ini akan diuji dengan *Run test*, jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali, 2013). *Run Test* dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$ : Jika nilai signifikansi  $< 5\%$ , maka residual tidak random atau terjadi autokorelasi.

$H_1$ : Jika nilai signifikansi  $> 5\%$ , maka residual random atau tidak terjadi autokorelasi.

### 3.7.2.4 Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak konstans pada regresi sehingga akurasi dari hasil prediksi menjadi meragukan. Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual dari satu observasi ke observasi yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas (Ghozali, 2013).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas yaitu (1) Melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2013). Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. (2) Uji *Glejser* dilakukan dengan membuat hipotesis apabila  $\text{sig} > 0,05$  maka tidak terdapat gejala Heterokedastisitas. Begitupula sebaliknya, apabila  $\text{sig} < 0,05$  maka terdapat gejala Heterokedastisitas.

### 3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap suatu variabel terikat, yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas (Nugroho, 2005). Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

Y	=	Tax Avoidance (CETR)
a	=	Konstanta
b <sub>1</sub>	=	Koefisien regresi untuk komisaris independen
b <sub>2</sub>	=	Koefisien regresi untuk komite audit
b <sub>3</sub>	=	Koefisien regresi untuk profitabilitas (ROA)
b <sub>4</sub>	=	Koefisien regresi untuk kompensasi rugi fiskal
X <sub>1</sub>	=	Komisaris independen
X <sub>2</sub>	=	Komite audit
X <sub>3</sub>	=	Profitabilitas (ROA)
X <sub>4</sub>	=	Kompensasi rugi fiskal

### 3.7.4 Uji Hipotesis

Analisis *goodness of fit* model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sample dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik, setidaknya pengukuran dari analisis ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2013).

#### 3.7.4.1 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013). Kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi yaitu bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2013). Setiap adanya penambahan satu variabel independen, maka R<sup>2</sup> pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti nilai R<sup>2</sup>, nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataannya, nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali, 2013). Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2013) apabila dalam uji empiris didapat nilai *adjusted R<sup>2</sup>* negatif, maka *adjusted R<sup>2</sup>* dianggap bernilai nol.

#### **3.7.4.2 Uji Statistik F (Secara Simultan)**

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang diasumsikan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik SPSS. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- 1)  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak apabila nilai signifikansi probabilitas pada hasil output analisis SPSS untuk uji F berada di atas 0,05 ( $> 0,05$ ). Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2)  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima apabila nilai signifikansi probabilitas pada hasil output analisis SPSS untuk uji F berada di bawah 0,05 ( $< 0,05$ ). Artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

#### **3.7.4.3 Uji Statistik t (Secara Parsial)**

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik SPSS. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- 1)  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak apabila signifikan t hitung  $> 0,05$  artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, bila dilakukan uji secara parsial.
- 2)  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima apabila signifikan t hitung  $< 0,05$  artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, bila dilakukan uji secara parsial.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan telah diolah pihak lain. Penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *website* personal perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Data mengenai Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Cash Effective Tax Rate* merupakan data dari laporan keuangan dan *annual report* perusahaan pada periode 2013-2016 yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya pada perusahaan yang tergabung dalam sektor industri barang konsumsi yaitu perusahaan sub sektor makanan dan minuman (*food and beverage*). Berdasarkan pada data yang diperoleh dari [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) terdapat 16 perusahaan yang telah melakukan *initial public offering* atau telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria tertentu. Maka perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 6.  
Kriteria Perusahaan yang Menjadi Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016	16
2	Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya selama tahun 2013-2016	14
3	Data yang dilampirkan dalam laporan keuangan lebih lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian ini	14
4	Laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama	14
5	Perusahaan yang menyampaikan laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2013-2016	12
6	Perusahaan dengan nilai laba positif agar tidak mengakibatkan nilai <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) terdistorsi	12
7	Perusahaan dengan nilai <i>Cash Effective Tax Rate</i> kurang dari satu	12

Berdasarkan pada kriteria serta kelengkapan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, maka berikut ini adalah tabel perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan:

Tabel 7.

Daftar Nama Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* yang Menjadi Objek Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tanggal Listing di BEI
1	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk	12 Februari 1984
2	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7 Oktober 2010
3	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	14 Juli 1994
4	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	4 Juli 1990
5	MLBI	PT Multi Bintang Tbk	17 Januari 1994
6	ROTI	PT Nippon Indosari Tbk	28 Juni 2010
7	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk	5 Januari 1993, Relisting : 28 September 2012
8	SKLT	PT Sekar Laut Tbk	8 September 1993
9	STTP	PT Siantar Top Tbk	16 Desember 1996
10	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera	11 Juni 1997
11	ULTJ	PT Ultrajaya Tbk	9 Juli 1990
12	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	9 Juli 1996

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diolah oleh penulis tahun 2018)

Total perusahaan *food and beverage* yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) perusahaan.

#### 4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sub sektor *food and beverage* periode 2013 sampai dengan periode 2016. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Delta Djakarta Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Multi Bintang Tbk, PT Nippon Indosari Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Siantar Top Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Ultrajaya Tbk, dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

##### 1. PT Delta Djakarta Tbk

PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) merupakan salah satu pemain terbesar di industri bir Indonesia saat ini. PT Delta Djakarta adalah produsen dan distributor

beberapa merek bir terbaik di dunia di bawah merek Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih. Perusahaan ini juga merupakan tokoh kunci di pasar minuman non-alkohol negara itu dengan merek Sodaku dan Soda Ice di antara penjual teratas di Indonesia.

Sejak didirikan pada tahun 1932 oleh perusahaan Jerman Archipel Brouwerij NV, kepemimpinan PT Delta Djakarta telah berpindah tangan berkali-kali. Dalam Perang Dunia II, kendali perusahaan diserahkan kepada perusahaan Belanda sebelum diteruskan ke perusahaan Jepang pada tahun 1942. Tiga tahun kemudian, Belanda mendapatkan kembali kendali.

Pada tahun 1970, perusahaan mengambil nama PT Delta Djakarta; dan pada tahun 1984 merupakan bagian dari perusahaan generasi pertama di Indonesia untuk *go public* dan menjual saham di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Hingga saat ini, pemegang saham utama PT Delta Djakarta termasuk Pemerintah Kota Jakarta dan San Miguel Malaysia (L) *Private Limited*. Pabriknya berlokasi di Jl. Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur dan Jawa Barat.

## 2. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) merupakan produsen makanan dalam kemasan yang mapan dan terkemuka dengan berbagai pilihan produk makanan sehari-hari bagi konsumen di segala usia. Banyak di antara merek produknya merupakan merek terkemuka yang telah melekat di hati masyarakat Indonesia, serta memperoleh kepercayaan dan loyalitas jutaan konsumen di Indonesia selama bertahun-tahun.

ICBP berdiri sebagai entitas terpisah di bulan September 2009 serta tercatat di BEI pada tanggal 7 Oktober 2010. ICBP didirikan melalui restrukturasi internal dari Group Produk Konsumen Bermerek (“CBP”) PT Indofood Sukses Makmur Tbk (“Indofood”), perusahaan induk ICBP yang sahamnya tercatat di BEI sejak tahun 1994. Melalui proses restrukturasi internal, seluruh kegiatan usaha Group CBP dari Indofood, yang meliputi mie instan, *dairy*, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus serta biskuit (sebelumnya tergabung dalam Group Bogasari), dialihkan ke ICBP. Pada saat ini Indofood tetap menjadi pemegang saham mayoritas ICBP dengan kepemilikan saham sekitar 80%. Oleh karenanya, ICBP tetap memiliki sinergi dengan perusahaan-perusahaan grup Indofood lainnya dalam menjaga keunggulan kompetitifnya.

## 3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk

PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, berdasarkan Akta Notaris No. 228 dari Beny Kristianto, SH. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 27 Jl. Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta, Indonesia, sedangkan pabriknya berlokasi di berbagai tempat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Dari awal yang sederhana sebagai produsen

mie instan, Indofood telah semakin berubah menjadi perusahaan makanan yang beroperasi di semua tahapan produksi makanan dari produksi bahan baku dan pengolahan produk.

Perusahaan mengoperasikan empat Kelompok Usaha Strategis yang saling melengkapi (*Group*): Produk Konsumen Bermerek (CBP), produsen berbagai makanan kemasan dibawah sejumlah divisi termasuk mie instan, susu, bumbu makanan, makanan ringan, nutrisi, dan khusus makanan dan biskuit. Warisan Indofood adalah kekuatan merek, banyak yang telah bersahabat dengan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Ini termasuk beberapa merek mie instan, tepung terigu, minyak goreng, margarin, dan sebagainya.

#### 4. PT Mayora Indah Tbk

PT Mayora Indah Tbk (MYOR) adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 4 Juli 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Unita Branindo sebanyak 32,93%. Perusahaan ini berdomisili di Tangerang dengan pabrik berlokasi di Tangerang dan Bekasi, kantor pusat berlokasi di Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya No. 21-23, Jakarta. Sesuai dengan pasal anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan, serta agen, atau perwakilan. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1987. PT Mayora Indah Tbk memiliki 9 lini produk, diantaranya biskuit, permen, wafer, coklat, jelly, *healthy food*, kopi, bubur, mie instan dan minuman.

Pada tanggal 25 Mei 1990, perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. SI-109/SHM.MK.10/1990 untuk menawarkan 3.000.000 saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek di Indonesia. Saham tersebut mulai tercatat di Bursa Efek pada tanggal 4 Juli 1990.

#### 5. PT Multi Bintang Indonesia Tbk

PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) didirikan pada tanggal 3 Juni 1929 berdasarkan akta notaris No. 8 dari Tjeered Djikstra, notaris di Medan, dengan nama N.V Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen. Perseroan berdomisili di Indonesia dengan kantor pusat berlokasi di Talavera Office Park Lantai 20, Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430, dan pabrik berlokasi di Jl. Daan Mogot KM. 19, Tangerang 15122 dan Jl. Raya Mojosari – Pacet KM. 50, Sampang Agung, Jawa Timur.

Pada Tanggal 15 Desember 1981, 16,71% dari modal dasar Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Dengan surat dari PT Bursa Efek Jakarta No. S-3728.BEJ.EEM/12/2000 tanggal 18 Desember 2000 dan PT Bursa Efek Surabaya No. JKT-019/MKT-LIST/BES/I/2001 tanggal 29 Januari 2001, saham perseroan yang ditempatkan sejumlah 21.070.000 dicatatkan di Bursa Efek Surabaya

sejak tanggal 5 Februari 2001. Pada tanggal 30 Nopember 2007, Bursa Efek Surabaya di-merger ke Bursa Efek Jakarta, dan keduanya membentuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, sejak 3 Desember 2007, saham-saham Perseroan diperdagangkan di BEI.

Perusahaan identik dengan salah satu produk unggulan yaitu Bir Bintang, sebuah merek ikonik dan telah dikenal luas di Indonesia. Multi Bintang juga memproduksi dan memasarkan merek bir premium internasional, Heineken®; kategori 0,0% alkohol, minuman bebas alkohol Bintang Zero dan Bintang Radler 0,0%; dan inovasi terbaru Bintang Radler, kombinasi unik Bir Bintang dengan jus lemon alami yang memberikan kesegaran ganda, sekarang tersedia juga dalam varian berbeda, Bintang Radler Grapefruit dengan jus grapefruit alami; minuman fine soda, Fayrouz; minuman ringan Green Sands dan merek cider nomor satu di dunia, Strongbow.

6. PT Nippon Indosari Corporindo Tbk

Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) (Sari Roti) didirikan 08 Maret 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Kantor pusat dan salah satu pabrik ROTI berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Jl. Selayar blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17530 – Jawa Barat, dan pabrik lainnya berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Cikarang blok U dan W – Bekasi, Pasuruan, Semarang, Makassar, Purwakarta, Palembang, Cikande dan Medan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup usaha utama ROTI bergerak di bidang pabrikasi, penjualan dan distribusi roti (roti tawar, roti manis, roti berlapis, *cake* dan *bread crumb*) dengan merek "Sari Roti". Pendapatan utama ROTI berasal dari penjualan roti tawar dan roti manis.

7. PT Sekar Bumi Tbk

Sekar Bumi Tbk (SKBM) didirikan 12 April 1973 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Kantor pusat SKBM berlokasi di Plaza Asia, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 dan pabrik berlokasi di Jalan Jenggolo 2 No. 17 Waru, Sidoarjo serta tambak di Bone dan Mare, Sulawesi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan ruang lingkup kegiatan SKBM adalah dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan. Sekar Bumi memiliki 2 divisi usaha, yaitu hasil laut beku nilai tambah (dimsum, udang berlapis tepung roti, bakso seafood, sosis, dan banyak lainnya). Selain itu, melalui anak usahanya, Sekar Bumi memproduksi pakan ikan, pakan udang, mete, dan produk kacang lainnya. Produk-produk Sekar Bumi dipasarkan dengan berbagai merk diantaranya SKB, Bumi Food, dan Mitraku.

8. PT Sekar Laut Tbk

PT.Sekar Laut Tbk (SKLT) adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi makanan, khususnya kerupuk, saos, dan bumbu masak. Proses produksi kerupuk telah dilakukan oleh pendiri sejak tahun 1976. Kantor pusat SKLT berlokasi



di Wisma Nugra Santana, Lt.7, Suit 707, Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 dan kantor cabang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.23-25, Surabaya, serta pabrik berlokasi di Jl. Jenggolo II/17 Sidoarjo. Berdasarkan anggaran besar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SKLT meliputi bidang industri pembuatan kerupuk, saos tomat, sambal dan bumbu masak serta menjual produknya didalam negeri maupun luar negeri.

#### 9. PT Siantar Top Tbk

Siantar Top Tbk (STTP) didirikan tanggal 12 Mei 1987 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1989. Kantor pusat Siantar Top beralamat di Jl. Tambak Sawah No. 21-23 Waru, Sidoarjo, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Bekasi (Jawa Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Sebagai pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur, pada tahun 1996 Siantar Top tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Saat ini PT Siantar Top terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan garda terdepan yang bergerak di bidang manufacturing makanan ringan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Siantar Top terutama bergerak dalam bidang industri makanan ringan, yaitu mie (snack noodle, antara lain: Soba, Spix Mie Goreng, Mie Gemes, Boyki, Tamiku, Wilco, Fajar, dll), kerupuk (crackers, seperti French Fries 2000, Twistko, Leanet, Opotato, dll), biskuit dan wafer (Goriorio, Gopotato, Go Malkist, Brio Gopotato, Go Choco Star, Wafer Stick, Superman, Goriorio Magic, Goriorio Otamtam, dll), dan kembang gula (candy dengan berbagai macam rasa seperti: DR. Milk, Gaul, Mango, Era Cool, dll). Selain itu, STTP juga menjalankan usaha percetakan melalui anak usaha (PT Siantar Megah Jaya).

#### 10. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) didirikan pada tanggal 26 Januari 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 143 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Asia Intisera. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1827.HT.01.01.Th.91 tanggal 31 Mei 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, Tambahan No. 2504 tanggal 13 Agustus 1991. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Alun Graha, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 233 Jakarta. Lokasi pabrik mie kering, biskuit dan permen terletak di Sragen, Jawa Tengah.usaha perkebunan kelapa sawit terletak di beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan. Usaha pengolahan dan distribusi beras terletak di Cikarang, Jawa Barat dan Sragen, Jawa Tengah.

Pada tanggal 14 Mei 1997, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-919/PM/1997 untuk melakukan penawaran umum 45 juta saham dengan nilai nominal Rp 500 (dalam Rupiah penuh) per saham kepada masyarakat

pada tanggal 11 Juni 1997, saham tersebut telah efektif dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha bidang perdagangan, perindustrian, peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan jasa. Sedangkan kegiatan usaha entitas anak meliputi usaha industri mie dan perdagangan mie, khususnya mie kering, mie instan dan bihun, snack, industri biskuit, permen, perkebunan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, pengolahan dana distribusi beras. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.

#### 11. PT Ultra Jaya Milk Industri & Trading Company Tbk

Ultra Jaya Milk Industri & Trading Company Tbk (ULTJ) didirikan tanggal 2 November 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Kantor pusat dan pabrik Ultrajaya berlokasi di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang – 40552, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Ultrajaya bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman, dan bidang perdagangan. Dibidang minuman Ultrajaya memproduksi rupa-rupa jenis minuman seperti susu cair, sari buah, teh, minuman tradisional dan minuman kesehatan, yang diolah dengan teknologi UHT (*Ultra High Temperature*) dan dikemas dalam kemasan karton aseptik. Dibidang makanan Ultrajaya memproduksi susu kental manis, susu bubuk dan konsentrat buah-buahan tropis. Merk utama dari produk-produk Ultrajaya, antara lain : susu cair (Ultramilk, Ultramimi, Susu Sehat, *Low Fat High Calcium*), teh (Teh Kotak dan Teh Bunga), minuman kesehatan dan lainnya (Sari Asam, Sari Kacang Hijau, dan Coco Pandan Drink), susu kental manis (cap Sapi), dan konsentrat buah-buahan (Ultra).

#### 12. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), dahulu bernama PT. Cahaya Kalbar Tbk., didirikan di Pontianak berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Februari 1968 yang dibuat di hadapan Mochamad Damiri, Notaris di Pontiak. Sesuai dengan Surat Persetujuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 10 Juni 1996 No. S-942/PM/1996. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan menjadi efektif dalam rangka Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum Perdana atas 34.000.000 (tiga puluh empat juta) saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus rupiah) per saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal di Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang industri yang memproses minyak sawit dan kacang illipe menjadi lemak nabati khusus termasuk kakao mentega setara (CBE), kakao mentega pengganti (CBS), kakao mentega extender (CBX) dan kakao mentega improver (CBI). Sementara di pengolahan kakao, CEKA memproses biji kakao menjadi bubuk kakao dan kako mentega untuk digunakan dalam industri makanan (misalnya cokelat, biskuit, kue, es krim, permen) dan industri oleo kimia. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 1971.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Kawasan Industri Jababeka II, Jl. Industri Selatan 3 Blok GG No. 1, Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat. Lokasi pabrik Perusahaan terletak di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat dan Pontianak, Kalimantan Barat. PT Wilmar Cahaya Tbk merupakan perusahaan dibawah Wilmar International Limited (“WIL”) Grup. WIL merupakan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura.

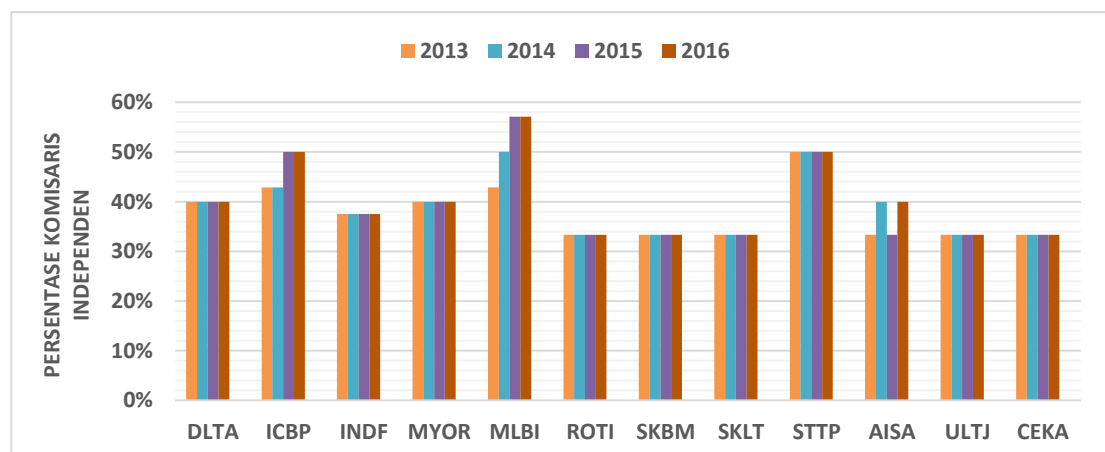
#### 4.1.2 Data Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset* (ROA) dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada 12 Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016

##### 1. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali begitu pula sebaliknya. Komisaris Independen dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Berikut persentase Komisaris Independen pada 12 perusahaan sub sektor *food and beverage* periode 2013-2016.



Gambar 3.

Komisaris Independen

Perusahaan *Food and Beverage* Periode 2013-2016

Pada perusahaan PT Delta Djakarta persentase Komisaris Independennya stabil dari tahun 2013-2016 yaitu sebesar 40%. Untuk perusahaan PT Indofood CBP persentase Komisaris Independennya pada tahun 2013-2014 stabil yaitu sebesar 43% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 7% menjadi 50% dan kembali stabil di tahun 2016. Pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur persentase Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan untuk periode 2013-2016 stabil yaitu sebesar 38%. PT Mayora Indah memiliki persentase Komisaris Independen yang stabil yaitu sebesar 40%. Persentase Komisaris Independen yang dimiliki oleh PT Multi Bintang Tbk dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 50% dan untuk tahun 2015-2016 stabil yaitu sebesar 57%. Untuk perusahaan PT Nippon Indosari Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Ultrajaya Tbk, dan PT Wilmar Cahaya Tbk persentase Komisaris Independennya stabil untuk periode 2013-2016 yaitu sebesar 33%. Dan untuk perusahaan terakhir yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera, persentase Komisaris Independennya mengalami fluktuatif untuk periode 2013-2016 dengan rata-rata sebesar 20%.

Tabel 8.

Komisaris Independen Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* Periode 2013-2016

Kode Perusahaan	Komisaris Independen				Rata-rata perubahan
	2013	2014	2015	2016	
DLTA	40%	40%	40%	40%	40%
ICBP	43%	43%	50%	50%	46,5%
INDF	38%	38%	38%	38%	38%
MYOR	40%	40%	40%	40%	40%
MLBI	43%	<b>50%</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>	51,75%
ROTI	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	33%
SKBM	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	33%
SKLT	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	33%
STTP	<b>50%</b>	<b>50%</b>	50%	50%	50%
AISA	<b>33%</b>	40%	<b>33%</b>	40%	36,5%
ULTJ	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	33%
CEKA	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	33%
Rata-rata	37,67%	38,83%	39,42%	40%	38,98%
Maksimum	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>	57%
Minimum	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	33%

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diolah oleh penulis tahun 2018)

Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa tahun 2013, persentase Komisaris Independen tertinggi dimiliki oleh PT Siantar Top Tbk yaitu sebesar 50%.

Sedangkan persentase Komisaris Independen terendah berada pada angka 33% dan dimiliki oleh enam perusahaan yaitu PT Nippon Indosari Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Tiga Pilar Tbk, PT Ultrajaya Tbk, dan PT Wilmar Cahaya Tbk. Pada tahun 2013, rata-rata Komisaris Independen dari 12 perusahaan yaitu sebesar 37,67%.

Untuk tahun 2014, peringkat Komisaris Independen tertinggi dimiliki oleh dua perusahaan yaitu PT Multi Bintang Tbk dan PT Siantar Top Tbk. Untuk persentase dengan nilai Komisaris Independen terendah, dimiliki oleh lima perusahaan yaitu PT Nippon Indosari Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Ultrajaya Tbk, dan PT Wilmar Cahaya Tbk. Pada tahun 2014, rata-rata Komisaris Independen dari 12 perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,16% menjadi 38,83%.

Pada tahun 2015, peringkat Komisaris Independen tertinggi dimiliki oleh PT Multi Bintang Tbk yaitu sebesar 57% dan hal ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7%. Untuk persentase Komisaris Independen terendah dimiliki oleh enam perusahaan yaitu PT Nippon Indosari Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Tiga Pilar Tbk, PT Ultrajaya Tbk, dan PT Wilmar Cahaya Tbk. Pada tahun 2015, rata-rata Komisaris Independen dari 12 perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,59% menjadi 39,42%.

Untuk tahun 2016, persentase Komisaris Independen tertinggi yaitu masih dimiliki oleh PT Multi Bintang Tbk yaitu sebesar 57% dan persentase Komisaris Independen terendah dimiliki oleh lima perusahaan yaitu PT Nippon Indosari Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Ultrajaya Tbk, dan PT Wilmar Cahaya Tbk. Pada tahun 2016, rata-rata Komisaris Independen dari 12 perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,58% menjadi 40%.

## 2. Komite Audit

Komite audit memiliki tanggung jawab dalam bidang *corporate governance* yaitu untuk memastikan, bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, mengutamakan etika dalam melakukan usaha, melakukan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Komite Audit dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\sum \text{Komite Audit} \times 100\%$$

Berikut persentase Komite Audit pada 12 perusahaan sub sektor *food and beverage* periode 2013-2016.



Gambar 4.

#### Komite Audit

#### Perusahaan *Food and Beverage* Periode 2013-2016

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa persentase Komite Audit yang dimiliki oleh 11 perusahaan *food and beverage* cukup stabil untuk periode 2013-2016 yaitu sebesar 300%. Perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Delta Djakarta Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Multi Bintang Tbk, PT Nippon Indosari Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Siantar Top Tbk, PT Ultrajaya Tbk, dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Sedangkan untuk perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera, persentase Komite Auditnya di tahun 2013 sebesar 300% mengalami kenaikan 100% di tahun 2014 menjadi 400% dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2015-2016 tetap stabil pada angka 400%.

Tabel 9.

#### Komite Audit Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* Periode 2013-2016

Kode Perusahaan	Komite Audit				Rata-rata perubahan
	2013	2014	2015	2016	
DLTA	300%	300%	300%	300%	300%
ICBP	300%	300%	300%	300%	300%
INDF	300%	300%	300%	300%	300%
MYOR	300%	300%	300%	300%	300%
MLBI	300%	300%	300%	300%	300%
ROTI	300%	300%	300%	300%	300%
SKBM	300%	300%	300%	300%	300%

SKLT	300%	300%	300%	300%	300%
STTP	300%	300%	300%	300%	300%
AISA	300%	<b>400%</b>	<b>400%</b>	<b>400%</b>	375%
ULTJ	300%	300%	300%	300%	300%
CEKA	300%	300%	300%	300%	300%
Rata-rata	300%	308,33%	308,33%	308,33%	306%
Maksimum	<b>300%</b>	<b>400%</b>	<b>400%</b>	<b>400%</b>	400%
Minimum	300%	300%	300%	300%	300%

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diolah oleh penulis tahun 2018)

Berdasarkan tabel 9, untuk tahun 2013 nilai tertinggi atau nilai terendah dari persentase Komite Audit yang dimiliki 12 perusahaan *food and beverage* berada pada angka yang sama yaitu sebesar 300%. Pada tahun 2013, rata-rata Komite Audit dari 12 perusahaan adalah 300%.

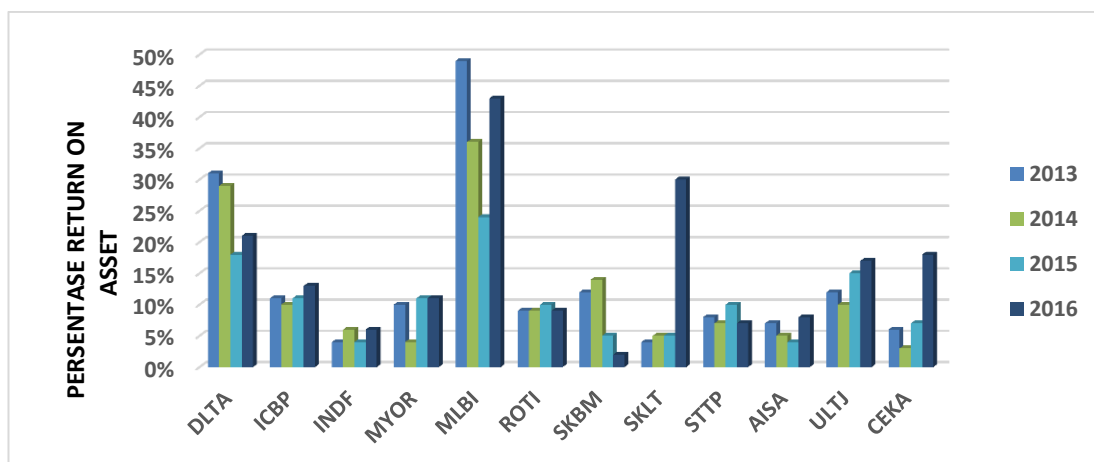
Sedangkan untuk periode 2014-2016, nilai Komite Audit tertinggi dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera yaitu sebesar 400% dan untuk nilai terendah dimiliki oleh 11 perusahaan antara lain : PT Delta Djakarta Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Multi Bintang Tbk, PT Nippon Indosari Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Siantar Top Tbk, PT Ultrajaya Tbk, dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Pada tahun 2014-2016, rata-rata Komite Audit dari 12 perusahaan mengalami kenaikan sebesar 8,33% menjadi 308,33%.

### 3. *Return on Asset* (ROA)

*Return on Asset* menggambarkan produktivitas dari seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin baik kinerja perusahaan dalam menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Laba yang meningkat berakibat pada ROA yang juga meningkat. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. *Return on Asset* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Return\ on\ Asset = \frac{Laba\ bersih}{Total\ Aset}$$

Berikut persentase ROA pada 12 perusahaan sub sektor *food and beverage* periode 2013-2016.



Gambar 5.

*Return on Asset*

Perusahaan *Food and Beverage* Periode 2013-2016

Data *Return on Asset* yang dimiliki perusahaan DLTA mengalami fluktuatif dengan persentase penurunan rata-rata sebesar 3,33%. ROA perusahaan ICBP dan INDF mengalami fluktuatif dengan persentase kenaikan rata-rata sebesar 0,67%. Untuk perusahaan MYOR, ROA perusahaan mengalami fluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,33%. ROA perusahaan MLBI mengalami fluktuatif dengan persentase penurunan rata-rata sebesar 2,00% dan penurunan tertinggi terjadi di tahun 2015. ROA perusahaan ROTI mengalami fluktuatif, pada tahun 2015 perusahaan mengalami peningkatan ROA sebesar 1% menjadi 10% dari persentase tahun sebelumnya 2013-2014 yaitu sebesar 9% dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1% menjadi 9%. Untuk perusahaan SKBM, ROA mengalami fluktuatif dengan rata-rata penurunan sebesar 3,33%. ROA dari perusahaan SKLT mengalami fluktuatif dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,67% dan kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu dari 5% (tahun 2015) menjadi 30%. ROA perusahaan STTP mengalami fluktuatif dengan rata-rata penurunan sebesar 0,33% sedangkan perusahaan AISA mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,33%. Pada perusahaan ULTI, ROA mengalami fluktuasi rata-rata kenaikan sebesar 1,67%. Dan yang terakhir untuk perusahaan CEKA, ROA mengalami fluktuatif dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,00%.



Tabel 10.

*Return on Asset* Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* Periode 2013-2016

Kode Perusahaan	<i>Return on Asset</i>				Rata-rata perubahan
	2013	2014	2015	2016	
DLTA	31%	29%	18%	21%	25%
ICBP	11%	10%	11%	13%	11%
INDF	<b>4%</b>	6%	<b>4%</b>	6%	5%
MYOR	10%	4%	11%	11%	9%
MLBI	<b>49%</b>	<b>36%</b>	<b>24%</b>	<b>43%</b>	38%
ROTI	9%	9%	10%	9%	9%
SKBM	12%	14%	5%	<b>2%</b>	8%
SKLT	<b>4%</b>	5%	5%	30%	11%
STTP	8%	7%	10%	7%	8%
AISA	7%	5%	<b>4%</b>	8%	6%
ULTJ	12%	10%	15%	17%	14%
CEKA	6%	<b>3%</b>	7%	18%	9%
Rata-rata	14%	12%	10%	15%	13%
Maksimum	<b>49%</b>	<b>36%</b>	<b>24%</b>	<b>43%</b>	49%
Minimum	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	2%

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diolah oleh penulis tahun 2018)

Berdasarkan tabel 10, terlihat bahwa pada tahun 2013, nilai *Return on Asset* tertinggi terjadi pada PT Multi Bintang Tbk yaitu sebesar 49%. Sedangkan nilai *Return on Asset* terendah terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Sekar Laut Tbk yaitu sebesar 4%. Rata-rata ROA pada tahun 2013 dari 12 perusahaan yaitu sebesar 14%.

Untuk tahun 2014 nilai *Return on Asset* tertinggi terjadi pada PT Multi Bintang Tbk yaitu sebesar 36%. Sedangkan nilai *Return on Asset* terendah terjadi pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk yaitu sebesar 3%. Rata-rata ROA pada tahun 2014 dari 12 perusahaan mengalami penurunan sebesar 2% yaitu dari 14% menjadi 12%.

Pada tahun 2015, nilai *Return on Asset* tertinggi masih terjadi pada PT Multi Bintang Tbk yaitu sebesar 24%. Sedangkan nilai *Return on Asset* terendah terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk sebesar 4%. Untuk tahun 2015, rata-rata ROA dari 12 perusahaan masih mengalami penurunan yaitu sebesar 2% menjadi 10%.

Di tahun 2016, nilai *Return on Asset* tertinggi terjadi pada PT Multi Bintang Tbk dan nilai *Return on Asset* terendah terjadi pada PT Sekar Bumi Tbk yaitu sebesar 2%. Rata-rata ROA pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5% yaitu dari 10% menjadi 15%.

#### 4. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi Rugi Fiskal adalah keadaan dimana perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak dan akan dikompensasi pada masa pajak berikutnya. Kerugian yang dialami perusahaan dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi tersebut. Akibat yang ditimbulkan ialah, selama lima tahun perusahaan akan diberikan keringanan untuk tidak dibebankan pajak.

Tabel 11.

#### Kompensasi Rugi Fiskal

Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* Periode 2013-2016

No	Kode Perusahaan	Tahun	Kompensasi Rugi Fiskal
1	DLTA	2013	0
	DLTA	2014	0
	DLTA	2015	0
	DLTA	2016	0
2	ICBP	2013	0
	ICBP	2014	0
	ICBP	2015	0
	ICBP	2016	0
3	INDF	2013	0
	INDF	2014	0
	INDF	2015	0
	INDF	2016	0
4	MYOR	2013	0
	MYOR	2014	0
	MYOR	2015	0
	MYOR	2016	0
5	MLBI	2013	0
	MLBI	2014	0
	MLBI	2015	0
	MLBI	2016	0
6	ROTI	2013	0
	ROTI	2014	0
	ROTI	2015	0
	ROTI	2016	0
7	SKBM	2013	0
	SKBM	2014	0
	SKBM	2015	0
	SKBM	2016	0

8	SKLT	2013	0
	SKLT	2014	0
	SKLT	2015	0
	SKLT	2016	0
9	STTP	2013	0
	STTP	2014	0
	STTP	2015	0
	STTP	2016	0
10	AISA	2013	1
	AISA	2014	1
	AISA	2015	0
	AISA	2016	0
11	ULTJ	2013	0
	ULTJ	2014	0
	ULTJ	2015	0
	ULTJ	2016	0
12	CEKA	2013	0
	CEKA	2014	0
	CEKA	2015	0
	CEKA	2016	0

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diolah oleh penulis tahun 2018)

Pada tabel diatas, ada perusahaan yang menggunakan Kompensasi Kerugian Fiskal pada periode 2013-2016. PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk memanfaatkan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk periode 2013 dan 2014. Selain itu, ada sebelas perusahaan yang tidak memiliki Kompensasi Kerugian Fiskal pada saat periode penelitian, antara lain yaitu perusahaan PT Delta Djakarta Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Multi Bintang Tbk, PT Nippon Indosari Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Siantar Top Tbk, PT Ultra Jaya Tbk, dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

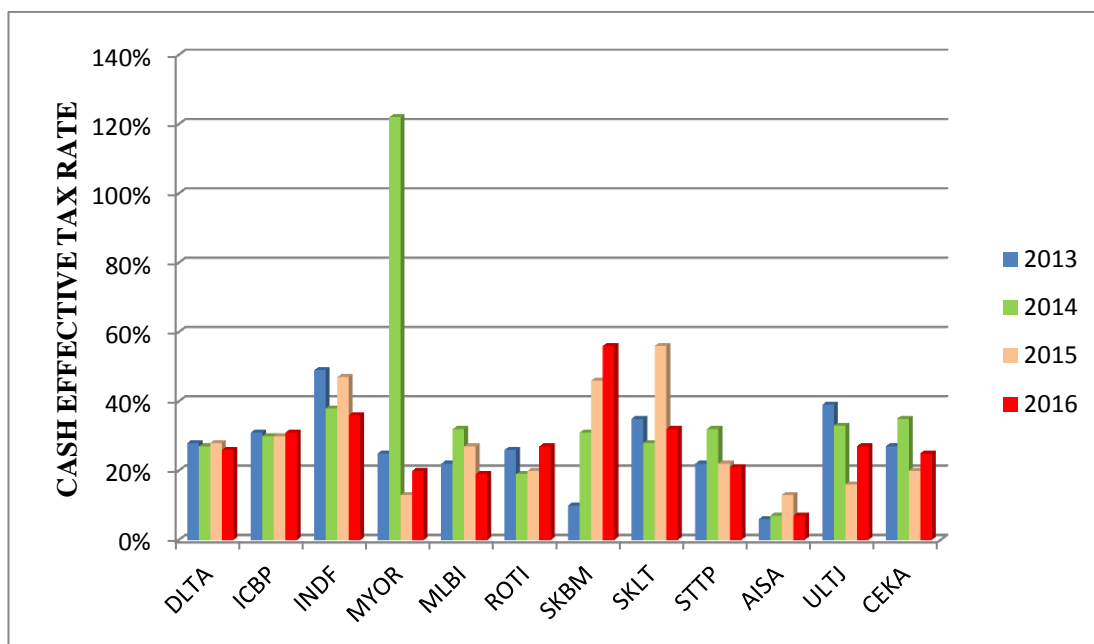
##### 5. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

*Cash Effective Tax Rate* merupakan salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.

*Cash Effective Tax Rate* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Jumlah Kas Yang Dibayarkan Untuk Pajak}}{\text{Laba Akuntansi Sebelum Pajak}}$$

Berikut persentase CETR pada 12 perusahaan sub sektor *food and beverage* periode 2013-2016.



Gambar 6.

*Cash Effective Tax Rate*

Perusahaan *Food and Beverage* Periode 2013-2016

Berdasarkan data di atas, CETR dari perusahaan DLTA mengalami fluktuasi penurunan dari tahun 2013-2016 dengan rata-rata sebesar 0,67%. CETR pada perusahaan ICBP cenderung stabil. CETR pada INDF mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunan sebesar 4,33%. Pada perusahaan MYOR, CETR mengalami fluktuasi penurunan sebesar rata-rata 1,67%. Pada perusahaan MLBI, CETR mengalami fluktuasi penurunan rata-rata sebesar 1,00%. Pada perusahaan ROTI, CETR mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,33%. CETR pada perusahaan SKBM mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,33%. CETR dari perusahaan SKLT mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunan sebesar 1,00%. Pada perusahaan STTP, CETR mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunan sebesar 0,33%. Pada perusahaan AISA, CETR mengalami fluktuasi kenaikan rata-rata sebesar 0,33%. CETR pada perusahaan ULTJ mengalami fluktuasi penurunan rata-rata sebesar 4,00%. Pada perusahaan CEKA, CETR mengalami fluktuasi penurunan sebesar rata-rata 0,67%.

Tabel 12.  
*Cash Effective Tax Rate* Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage*  
 Periode 2013-2016

Kode Perusahaan	<i>Cash Effective Tax Rate</i>				Rata-rata perubahan
	2013	2014	2015	2016	
DLTA	0,2792	0,2661	0,2767	0,2612	0,2708
ICBP	0,3088	0,2977	0,2968	0,3068	0,3025
INDF	<b>0,4929</b>	0,3783	0,4703	0,3627	0,4260
MYOR	0,2548	<b>1,2153</b>	<b>0,1265</b>	0,1984	0,4487
MLBI	0,2191	0,3152	0,2707	0,1913	0,2490
ROTI	0,2646	0,1903	0,2017	0,2735	0,2325
SKBM	0,1033	0,3084	0,4556	<b>0,5622</b>	0,3573
SKLT	0,3529	0,2778	<b>0,5644</b>	0,3190	0,3785
STTP	0,2190	0,3179	0,2208	0,2082	0,2414
AISA	<b>0,0571</b>	0,2778	0,1339	<b>0,0669</b>	0,0831
ULTJ	0,3903	0,3179	0,1594	0,2714	0,2889
CEKA	0,2718	<b>0,0746</b>	0,1963	0,2510	0,2661
Rata-rata	0,2678	0,3602	0,2811	0,2727	0,0813
Maksimum	<b>0,4929</b>	<b>1,2153</b>	<b>0,5644</b>	<b>0,5622</b>	0,7087
Minimum	<b>0,0571</b>	<b>0,0746</b>	<b>0,1265</b>	<b>0,0669</b>	0,2955

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diolah oleh penulis tahun 2018)

Berdasarkan tabel 12, terlihat bahwa tahun 2013 nilai CETR tertinggi terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu sebesar 0,4929. Sedangkan nilai CETR terendah dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk yaitu sebesar 0,0571. CETR pada tahun 2013 memiliki rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 0,2678 atau 26,78%.

Untuk tahun 2014 nilai CETR tertinggi terjadi pada PT Mayora Indah Tbk yaitu sebesar 1,2153. Sedangkan nilai CETR terendah dimiliki oleh PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk sebesar 0,0746. Rata-rata CETR pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 0,3602 atau 36,02%.

Pada tahun 2015, nilai CETR tertinggi dimiliki oleh PT Sekar Laut Tbk yaitu sebesar 0,5644. Nilai CETR terendah dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk yaitu sebesar 0,1265. Rata-rata CETR pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu dari 0,3602 menjadi 0,2811 atau sebesar 28,11%.

Untuk tahun 2016, nilai CETR tertinggi dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk yaitu sebesar 0,5622 dan nilai terendah dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk yaitu sebesar 0,0669. Dan rata-rata CETR tahun 2016 untuk keseluruhannya mengalami penurunan menjadi 0,2727 atau 27,27%.

## 4.2. Analisis Data

### 4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk penggambaran tentang statistik data seperti min, max, *mean*, sum, standar deviasi, *variance*, *range* dan lain-lain (Duwi Priyatno, 2014, 30). Berikut merupakan hasil statistik deskriptif untuk penelitian ini dengan Komisararis Independen, Komite Audit, *Return on Asset* dan Kompensasi Rugi Fiskal sebagai variabel independen serta *Tax Avoidance* sebagai variabel dependennya.

Tabel 13.  
Analisis Statistik Deskriptif  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	48	5,71	121,53	29,5448	17,66693
KOIN	48	33,00	57,00	38,9792	7,06953
KOA	48	300,00	400,00	306,2500	24,46230
ROA	48	2,25	48,59	12,6594	10,43693
KORF	48	,00	1,00	,0417	,20194
Valid N (listwise)	48				

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23, Tahun 2018)

Pada tabel 13, menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 sampel data yang diambil dari laporan keuangan publikasi tahunan perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Hasil tersebut diperoleh dari data, dimana 12 perusahaan tersebut dikalikan periode tahun pengamatan (4 tahun), sehingga observasi dalam penelitian ini menjadi  $12 \times 4 = 48$  observasi.

Data nilai *Cash Effective Tax Rate* (Y) dengan hasil rata-rata (*mean*) sebesar 29,5448 dan standar deviasinya 17,66693. Nilai yang dimiliki Komisararis Independen (X1) terendah (*minimum*) sebesar 33,00, nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 57,00, dengan nilai rata-rata sebesar 38,3478 atau dan standar deviasi 7,06953. Nilai Komite Audit (X2) dengan nilai terendah sebesar 300,00, nilai tertinggi sebesar 400,00, rata-rata yang dimiliki sebesar 306,2500 dan standar deviasi 24,46230. Nilai yang dimiliki *Return on Asset* (X3) dengan nilai terendah 2,25, nilai tertinggi sebesar 48,59, rata-rata dari variabel ini yaitu 12,6594, dan standar deviasinya sebesar 10,43693. Sedangkan untuk Kompensasi Rugi Fiskal nilai minimum yang diperoleh

adalah sebesar 0,00 , nilai tertingginya yaitu 1,00, rata-rata yang dimiliki oleh variabel ini adalah sebesar 0,0417 dan standar deviasinya sebesar 0,20194.

#### 4.2.2. Analisis Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas pada model regresi. Model regresi yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya.

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan model regresi yang digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of Regression*, Histogram, dan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 14.  
Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* Sebelum Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	15,84532336
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,172
	Positive	,172
	Negative	-,142
Test Statistic		,172
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,001 yang berarti data tersebut memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan atau diolah belum terdistribusi secara normal. Pada pengujian normalitas dengan analisis statistik dapat diketahui bahwa data yang digunakan oleh peneliti tidak berdistribusi normal. Untuk mendapatkan

normalitas data maka dalam penelitian ini dilakukan proses transformasi dengan membuang data outlier atau data pengganggu.

Pengujian data outlier digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data yang menyimpang dalam data yang akan diteliti. Pengujian outlier dapat dilakukan dengan cara menentukan ambang batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier dengan cara mengkonversi nilai data penelitian ke dalam *standard score* atau *Z-score* dengan nilai rentang antara -2,5 sampai 2,5. Batasan nilai tersebut cenderung menghasilkan normalitas yang lebih baik (Sufren dan Natanael, 2013, 51).

Setelah dilakukan transformasi data, peneliti mendapatkan ada 4 data yang bernilai ekstrim dan membuang data ekstrim tersebut sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi sebanyak 44 sampel data. Dengan data baru, peneliti menguji kembali normalitas untuk melihat apakah data pengujian telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data P-Plot setelah proses transformasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 15.  
Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* Setelah Outlier

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	8,92216575
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,066
	Positive	,066
	Negative	-,066
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

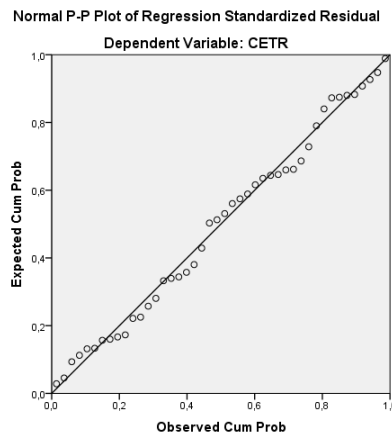
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

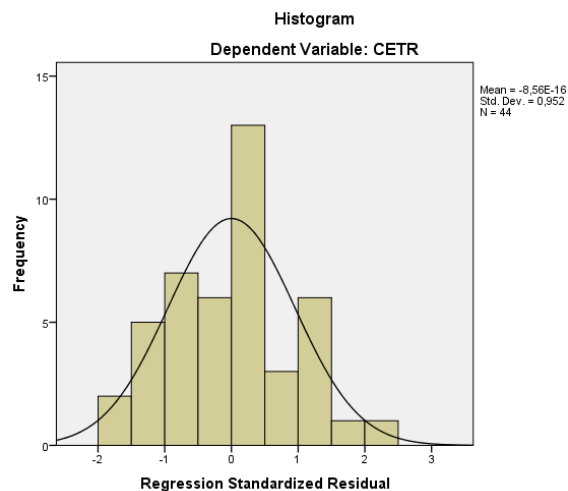
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,200. Karena signifikansi yang dihasilkan berada diatas 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini setelah dilakukannya proses transformasi dapat dinyatakan berdistribusi normal.





Gambar 7.  
*Normal Probability Plot-Cash Effective Tax Rate (CETR)*  
(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Pada *normal probability plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal (normal) serta penyebarannya mengikuti garis diagonal (normal). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang terdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 8.  
Hasil Uji Normalitas Histogram-*Cash Effective Tax Rate (CETR)*  
(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Dari grafik histogram di atas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak menceng (*skewness*) ke kanan maupun menceng (*skewness*) ke kiri maka dinyatakan normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebasnya. Uji multikolinieritas dilihat dari hasil pengujian dan mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance lebih dari 0,10. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinieritas:

Tabel 16.  
Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	105,34 2	21,534		4,892	,000		
KOIN	-,023	,238	-,012	-,097	,923	,940	1,064
KOA	-,191	,062	-,414	-3,100	,004	,829	1,206
ROA	-7,801	2,428	-,415	-3,213	,003	,891	1,123
KORF	- 17,244	7,335	-,310	-2,351	,024	,854	1,170

a. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Berdasarkan tabel 16 diketahui bahwa nilai *tolerance* keempat variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas. Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset*, dan Kompensasi Rugi Fiskal yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini tidak mempunyai penyimpangan atau adanya hubungan yang linier antar variabel independen.

## 3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Jika terjadi korelasi, maka menunjukkan adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Statistik *Run Test* digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi. Berikut ini adalah hasil pengujiannya.

Tabel 17.  
Uji Autokorelasi  
**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,038005
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	22
Total Cases	44
Number of Runs	20
Z	-,763
Asymp. Sig. (2-tailed)	,446

a. Median

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Runt Test. Berdasarkan tabel 17 menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,446 > 0,05. Maka data yang digunakan tersebut tidak terdapat masalah autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1.

#### 4. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Jika Sig > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas pada data yang diambil oleh peneliti. Berikut ini hasil uji heterokedastisitas dengan uji *Glejser* :

Tabel 18.  
Hasil Uji Glejser

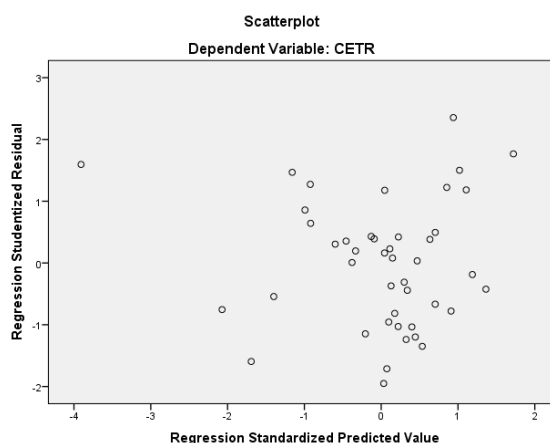
Model	t	Sig.
1 (Constant)	1,875	,068
KOIN	-,903	,372
KOA	-,778	,441
ROA	-,808	,424

KORF	,660	,513
------	------	------

a. Dependent Variable: ABS\_RES

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Berdasarkan tabel 18, persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi keseluruhan diatas 5%, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti tidak terdapat heterokedastisitas dalam model ini, dengan kata lain semua variabel independen yang terdapat dalam model memiliki sebaran varian yang sama.



Gambar 9.

Pola Titik-titik Pada Scatterplots

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Berdasarkan gambar 9 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi *Tax Avoidance* berdasarkan masukan variabel independen Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset*, dan Kompensasi Rugi Fiskal.

#### 4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam melakukan analisis linier berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik (residual yang terdistribusi normal, asumsi heterokedastisitas autokorelasi dan multikolinieritas antar variabel independen) agar memenuhi sifat estimasi regresi bersifat BLUES (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel dependen *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen yaitu Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset*, dan Kompensasi Rugi Fiskal. Berikut

ini adalah hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan SPSS Versi 23 dengan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen:

Tabel 19.  
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 1 (Constant)	105,342	21,534		4,892	,000		
KOIN	-,023	,238	-,012	-,097	,923	,940	1,064
KOA	-,191	,062	-,414	-3,100	,004	,829	1,206
ROA	-7,801	2,428	-,415	-3,213	,003	,891	1,123
KORF	-17,244	7,335	-,310	-2,351	,024	,854	1,170

a. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 105,342 + (-0,023).X_1 + (-0,191).X_2 + (-7,801).X_3 + (-17,244).X_4$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance* (CETR)

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi untuk komisaris independen

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi untuk komite audit

b<sub>3</sub> = Koefisien regresi untuk profitabilitas (ROA)

b<sub>4</sub> = Koefisien regresi untuk kompensasi rugi fiskal

X<sub>1</sub> = Komisaris independen

X<sub>2</sub> = Komite audit

X<sub>3</sub> = Profitabilitas (ROA)

X<sub>4</sub> = Kompensasi rugi fiskal

Intepretasi dari regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta

Nilai konstanta (a) adalah 105,342 : artinya jika Komisaris Independen, Komite Audit, ROA, dan Kompensasi Rugi Fiskal nilainya 0, maka Y yaitu CETR nilainya positif sebesar 105,342.

2. Koefisien Regresi Variabel Komisaris Independen

Nilai koefisien regresi variabel Komisaris Independen ( $b_1$ ) bernilai negatif yaitu sebesar -0,023 : hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan berlawanan arah dengan arah CETR. Setiap kenaikan Komisaris Independen sebesar satu satuan, maka CETR akan mengalami penurunan sebesar -0,023 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

3. Koefisien Regresi Variabel Komite Audit

Nilai koefisien regresi variabel Komite Audit ( $b_2$ ) bernilai negatif yaitu sebesar -0,191 : hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki hubungan berlawanan arah dengan CETR. Setiap kenaikan Komite Audit sebesar satu satuan, maka CETR akan mengalami penurunan sebesar -0,191 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

4. Koefisien Regresi Variabel *Return on Asset*

Nilai koefisien regresi variabel ROA ( $b_3$ ) bernilai negatif yaitu sebesar -7,801 : hal ini menunjukkan bahwa ROA memiliki hubungan berlawanan arah dengan CETR. Setiap kenaikan ROA sebesar satu satuan, maka CETR akan mengalami penurunan sebesar -7,801 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

5. Koefisien Regresi Variabel Kompensasi Rugi Fiskal

Nilai koefisien regresi variabel Kompensasi Rugi Fiskal ( $b_4$ ) bernilai negatif yaitu sebesar sebesar -17,244 : hal ini menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan arah CETR. Setiap kenaikan Kompensasi Rugi Fiskal sebesar satu satuan, maka CETR akan mengalami penurunan sebesar (-17,244) dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

#### 4.2.4. Analisis Uji Hipotesis

Analisis *goodness of fit* model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sample dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik, setidaknya pengukuran dari analisis ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Ada beberapa cara untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan dalam regresi berganda salah satunya adalah nilai *Adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dinilai lebih merepresentasikan nilai pengaruh yang sebenarnya. Hal ini akan terlihat dari analisis nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang dapat bertambah atau berkurang ketika ada penambahan variabel baru. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 20.  
Uji Koefisien Determinasi  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,649 <sup>a</sup>	,422	,362	9,36855

a. Predictors: (Constant), KOIN, KOA, ROA, KORF

b. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Berdasarkan hasil pada tabel 20, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,362 yang berarti pengaruh *Tax Avoidance* mampu dijelaskan oleh variabel Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset* dan Kompensasi Rugi Fiskal sebesar 0,362 atau sebesar 36,2%, sedangkan sisanya 63,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 2. Uji Statistik F (Secara Simultan)

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang diasumsikan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset* dan Kompensasi Rugi Fiskal secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate (Tax Avoidance)*. Berikut merupakan uji F yang telah di olah dengan aplikasi SPSS versi 23:

Tabel 21.  
Uji Statistik F  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2496,415	4	624,104	7,111	,000 <sup>b</sup>
Residual	3423,017	39	87,770		
Total	5919,432	43			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), KOIN, KOA, ROA, KORF

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Hasil uji F menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 7,111 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk  $F_{tabel}$  diperoleh hasil sebesar 2,612 pada signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 4, dan df 2 (n-k-1) atau 44-4-1= 39 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Sehingga dapat

disimpulkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $7,111 > 2,612$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka dalam hal ini  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara simultan Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset*, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

### 3. Uji Statistik t (Secara Parsial)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menguji signifikansi dari nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi, dapat dilihat dari nilai t dan nilai signifikansinya.

Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .  $T_{tabel}$  dicari pada signifikansi  $0,05/2=0,025$  (uji dua sisi) dengan tingkat derajat kebebasan  $df=n-k-1$  atau  $df=48-4-1=43$ . Berikut ini merupakan hasil dari uji t yaitu sebagai berikut.

Tabel 22.  
Uji Statistik t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	105,342	21,534		4,892	,000
	KOIN	-,023	,238	-,012	-,097	,923
	KOA	-,191	,062	-,414	-3,100	,004
	ROA	-7,801	2,428	-,415	-3,213	,003
	KORF	-17,244	7,335	-,310	-2,351	,024

a. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

#### a. Komisaris Independen ( $X_1$ ) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $t_{hitung} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak dan jika signifikansi  $t_{hitung} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Pada tabel 22, Komisaris Independen memiliki  $t_{hitung}$  sebesar (-0,097) dengan tingkat signifikansi  $0,923 > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.



b. Komite Audit ( $X_2$ ) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $t_{hitung} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak dan jika signifikansi  $t_{hitung} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Pada tabel 22, Komite Audit memiliki  $t_{hitung}$  sebesar (-3,100) dengan tingkat signifikansi  $0,004 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

c. *Return on Asset* ( $X_3$ ) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $t_{hitung} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak dan jika signifikansi  $t_{hitung} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Pada tabel 22, *Return on Asset* memiliki  $t_{hitung}$  sebesar (-3,213) dengan tingkat signifikansi  $0,003 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa *Return on Assets* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

d. Kompensasi Rugi Fiskal ( $X_4$ ) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $t_{hitung} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak dan jika signifikansi  $t_{hitung} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Pada tabel 22, Kompensasi Rugi Fiskal memiliki  $t_{hitung}$  sebesar (-2,351) dengan tingkat signifikansi  $0,024 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset*, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 23.  
Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipoesis	Hasil Uji Hipotesis
H <sub>1</sub>	Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
H <sub>2</sub>	Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
H <sub>3</sub>	<i>Return on Asset</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
H <sub>4</sub>	Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima

### 1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menguji signifikansi dari nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi, dapat dilihat dari nilai t dan nilai signifikansinya.

Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .  $T_{tabel}$  dicari pada signifikansi  $0,05/2=0,025$  (uji dua sisi) dengan tingkat derajat kebebasan  $df=n-k-1$  atau  $df=44-4-1=39$ . Berikut ini merupakan hasil dari uji t yaitu sebagai berikut.

#### a. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 22, variabel Komisaris Independen ( $X_1$ ) memiliki signifikansi 0,923 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,923 > 0,05$ ). Sedangkan untuk hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,097 dan  $t_{tabel}$  (0,025;39) yaitu sebesar -2,023 maka  $(-t_{hitung} > -t_{tabel})$  ( $-0,097 > -2,023$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga  $H_1$  dalam penelitian ini ditolak.

#### b. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 22, variabel Komite Audit ( $X_2$ ) memiliki signifikansi 0,004 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,004 < 0,05$ ). Sedangkan untuk hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,100 dan  $t_{tabel}$  (0,025;39) yaitu sebesar -2,023 maka  $(-t_{hitung} < -t_{tabel})$  ( $-3,100 < -2,023$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga  $H_2$  dalam penelitian ini diterima namun memiliki arah yang berbeda yaitu negatif.

#### c. Pengaruh *Return on Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 22, variabel *Return on Asset* ( $X_3$ ) memiliki signifikansi 0,003 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,003 < 0,05$ ). Sedangkan untuk hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,213 dan  $t_{tabel}$  (0,025;39) yaitu sebesar -2,023 maka  $(-t_{hitung} < -t_{tabel})$  ( $-3,213 < -2,023$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, variabel *Return on Asset* secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga  $H_3$  dalam penelitian ini diterima namun memiliki arah yang berbeda yaitu negatif.

#### d. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 22, variabel Kompensasi Rugi Fiskal ( $X_4$ ) memiliki signifikansi 0,024 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,024 < 0,05$ ). Sedangkan untuk hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,351 dan  $t_{tabel}$  (0,025;39) yaitu sebesar -2,023 maka ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) ( $-2,351 < -2,023$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, variabel Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga  $H_4$  dalam penelitian ini diterima namun memiliki arah yang berbeda yaitu negatif.

## 2. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang diasumsikan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil uji F dalam penelitian ini berdasarkan pada tabel 21 yaitu:

Hasil uji F menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 7,111 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk  $F_{tabel}$  diperoleh hasil sebesar 2,612 pada signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 4, dan df 2 ( $n-k-1$ ) atau  $44-4-1=39$  ( $n$  adalah jumlah kasus dan  $k$  adalah jumlah variabel independen). Sehingga dapat disimpulkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $7,111 > 2,612$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka dalam hal ini  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara simultan Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset*, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

## 3. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pada tabel 20, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,362. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset* dan Kompensasi Rugi Fiskal sebesar 0,362 atau sebesar 36,2%, sedangkan sisanya 63,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka dibawah ini penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

### 4.4.1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik, dalam penelitian ini variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*. Pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak perusahaan dapat dijelaskan semakin banyak jumlah Komisaris Independen maka semakin besar pengaruhnya dalam melakukan pengawasan kinerja manajemen. Sehingga indikasi untuk melakukan penghindaran pajak juga akan menurun, tetapi

pengawasan internal secara langsung cukup sulit mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena Komisaris Independen hanya memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja manajemen dan yang mengambil keputusan tetaplah manajemen itu sendiri. Wewenang yang dimiliki oleh Komisaris Independen tidak bisa secara langsung mengurangi keinginan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Agusti, 2014).

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feranika (2014), Winata (2014), Marfiah & Syam (2016), dan Romauli (2017) yang menunjukkan bahwa Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun, penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2012), Kurniasih (2013), dan Agusti (2014) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* yang diproksikan dengan komposisi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.

#### **4.4.2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik, variabel Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, namun memiliki arah yang berbeda yaitu negatif. Hasil negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase Komite Audit yang dimiliki perusahaan maka akan menurunkan tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan, begitu pula sebaliknya. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh Komite Audit. Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya Komite Audit beranggotakan tiga orang. Apabila jumlah Komite Audit tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Semakin sedikit Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan akan menjadi sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak yaitu tindakan yang memiliki tujuan utama untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin banyak jumlah Komite Audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki Komite Audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena Komite Audit akan memonitor segala kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Sehingga dapat diketahui bahwa Komite Audit yang ada pada perusahaan di Indonesia telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip *Corporate Governance* (CG). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Sari (2014) dimana Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Akan tetapi, temuan penelitian ini mendukung hasil terdahulu yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) dan Dewi & Jati (2014) dimana para peneliti terdahulu tersebut membuktikan secara empiris bahwa variabel Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

#### **4.4.3. Pengaruh Profitabilitas (*Return on Asset*) terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Return on Asset (ROA)* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, namun memiliki arah yang berbeda yaitu negatif. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016), Tommy Kurniasih & Maria M. Sari (2013), dan Zamhuri (2016) dimana *Return On Asset* memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih (2013), Agusti (2014), dan Annisa (2017) yang menemukan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat maka laba operasional yang akan diterima oleh perusahaan pun meningkat, sehingga nilai pembayaran pajaknya pun meningkat. Karena hal inilah Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA mengindikasikan perusahaan untuk melakukan praktik *Tax Avoidance*. Tanda negatif dapat diartikan ketika laba meningkat, maka penghindaran pajak akan menurun hal ini disebabkan tingginya nilai ROA akan membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal (Annisa, 2017).

#### **4.4.4. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance***

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, namun memiliki arah yang berbeda yaitu negatif. Hasil negatif pada variabel ini menunjukkan bahwa jika perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal, maka akan berdampak pada menurunnya besaran *tax avoidance* dan sebaliknya, jika perusahaan sampel tidak memiliki Kompensasi Rugi Fiskal, maka akan berdampak pada meningkatnya *tax avoidance*. Menurut UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang artinya adalah jika penghasilan bruto suatu perusahaan atau Wajib Pajak setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Dalam *agency theory* pihak manajemen (*agent*) lebih mementingkan pembayaran pajak yang lebih kecil. Sehingga Kompensasi Rugi

Fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ginting (2016), Tommy Kurniasih & Maria M. Sari (2013), dan Zamhuri (2016) bahwa Kompensasi Rugi Fiskal memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset (ROA)* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* dengan sample penelitian perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t$  sebesar (-0,097) dan tingkat signifikansi 0,923. Hipotesis ini tidak sesuai dengan dugaan atau hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Variabel *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komite Audit secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t$  sebesar (-3,100) dan tingkat signifikansi 0,004. Hipotesis ini sesuai dengan dugaan atau hipotesis sebelumnya tetapi memiliki arah yang berbeda yaitu negatif.
3. Variabel Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t$  sebesar (-3,213) dan tingkat signifikansi 0,003. Hipotesis ini sesuai dengan dugaan atau hipotesis sebelumnya tetapi memiliki arah yang berbeda yaitu negatif.
4. Variabel Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t$  sebesar (-2,351) dan tingkat signifikansi 0,024. Hipotesis ini sesuai dengan dugaan atau hipotesis sebelumnya tetapi memiliki arah yang berbeda yaitu negatif.
5. Variabel Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Asset* dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $F$  sebesar 7,111 dan tingkat signifikansi 0,000. Sehingga hipotesis ini sesuai dengan dugaan atau hipotesis sebelumnya.

## 5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa pada penelitian yang telah dilakukan saat ini masih memiliki keterbatasan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk semua pihak terutama yang akan melakukan penelitian serupa. Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih baik agar dapat mengendalikan efisiensi jumlah pajak yang akan diberikan kepada pemerintah seperti melakukan penghindaran pajak baik dari segi pendapatan maupun biaya-biaya yang dapat dikurangi sebagai beban pajak seperti depresiasi. Selain itu perusahaan juga agar dapat memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia dalam perusahaan mengenai undang-undang perpajakan terbaru agar karyawan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik dan benar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, dapat memasukkan variabel-variabel yang berbeda untuk melihat pengaruh pada tingkat penghindaran pajak perusahaan dan dapat juga menggunakan 11 cara pengukuran penghindaran pajak yang lainnya yang sudah di bahas dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil pengukuran dan dapat menjadi pembanding dengan penelitian sebelumnya, model manakah yang paling baik dalam menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, melakukan perluasan perusahaan sample penelitian yang dapat menunjukkan hasil yang berbeda dan semakin akurat. Peneliti selanjutnya juga sebaiknya menambah periode penelitian karena semakin panjang waktu penelitian akan diketahui variasi yang terjadi pada suatu perusahaan dan tentunya memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih tepat dan akurat dimasa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi (2012), *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Agung Wibawa, Wilopo dan Yusri Abdillah (2016), *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)*. Jurnal Perpajakan Vol. 11 No. 1: 1-9.
- Annisa (2017), *Pengaruh ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan dan oneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015)*. Jom Fekon Vol. 4 No. 1: 685-698.
- Annisa Fadilla Rachmitasari (2015), *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ayu Feranika (2014), *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal, Jambi, Universitas Jambi.
- Azilia Yocelyn dan Yulius J. Christiawan (2012), *Analisis Pengaruh Perusahaan Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham pada Perusahaan Berkapitalisasi Besar*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Surabaya Vol. 14 No. 2: 81-90.
- Bernhart, S. W. and Rosenstein S. (1998), *Board composition, Managerial Ownership, and Firm Performance: An Empirical Analysis*. Financial Review 33: 1-16
- Bily Al Ifanda (2016), *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014)*. Skripsi, Lampung, Universitas Lampung
- Brigham, Eugene F. and Joel Houston (2001), *Fundamentals of Financial Management*, Buku 1, Edisi 8, Jakarta, Penerjemah Erlangga.
- D. Hanggraeni (2014), *Manajemen Risiko Perusahaan Terintegritas (Enterprise Risk Management) dan Good Corporate Governance*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Damodar N. Gujarati (2006), *Ekonometrika Dasar*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Denny Septriadi Darussalam (2009), *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*, Danny Darussalam Tax Centre: Jakarta.
- Duwi Priyatno (2012), *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*, Edisi 1, Yogyakarta, ANDI.

- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew (2010), *The Effects of Executive on Corporate Tax Avoidance*. The Accounting Review Vol. 85 No. 4: 1163-1189
- Eisenhardt, K.M (1989), *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review* Vol. 14. No. 1: 57-74.
- Erly Suandy (2008), *Perencanaan Pajak*, Buku 1, Edisi 4, Jakarta, Salemba Empat.
- Fenny Winata (2014), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013*. *Jurnal Tax & Accounting Review* Vol. 4 No. 1: 1-11.
- Gideon SB Boediono (2005), *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Ginting, Suriani (2016), *Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating*. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* Vol. 6 No. 2: 165-176.
- Gusti Maya Sari (2014), *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*. *Jurnal WRA* Vol. 2 No. 2: 491-511.
- H. Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono (2003), *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan Di Indonesia?* *Jurnal Widya Warta*, No. 2 Tahun XXVI/Juli 2003.
- Hanlon, M. and Heitzman S. (2010), *A Review of Tax Research*. *Journal of Accounting and Economics* 50: 127-178.
- Harahap, Sopyan Syafri (2007), *Teori Akuntansi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Hutagaol, John (2007), *Perpajakan, Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- IAI (2016), *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, Edisi Revisi, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Imam Ghozali (2013), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Edisi 7, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Irham Fahmi (2011), *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung, Alfabeta.
- Kasmir (2011), *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2014), *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Kesit Bambang Prakosa (2014), *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII.

- Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016), *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 1 No.2: 167-193.
- M. A Ujijantho dan Pramuka B.A (2007), *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Marchia Sulistiani (2013), *Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Dividend Payout Ratio, Cash Holding, dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2011)*. Jurnal Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri.
- Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrih Asyik (2017), *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 8: 1-19.
- Muhammad F. Saputra, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati (2015), *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Yang Terdaftar di BEI*. Jurnal, Padang, Universitas Bung Hatta.
- Muhammad Oktofian (2015), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*, Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri.
- Muhammad Yogi Nugraha (2017), *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016*. Jurnal.
- Okta. R Praditia (2010), *Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2005-2008)*. Skripsi, Semarang, UNDIP.
- Oyong Lisa (2012), *Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan Dalam Hubungan Keagenan*. Jurnal Wiga Vol. 2 No. 1: 42-49.
- Pohan, H. T (2008), *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Jurnal. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Rahmi Fadhilah (2014), *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Jurnal Skripsi, Padang, Universitas Negeri Padang.
- Rimsky K. Judisseno (2005), *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

- Rinaldi dan Cahroline Cheiseiviyanny (2015), *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal, Padang, Universitas Negeri Padang.
- Rodriguez, E.F and A.M Arias (2013), *Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate*. *The Chinese Economy* 45(6): 60-83.
- Siallagan, H. dan M. Machfoedz. (2006). *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Singgih Santoso (2012), *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Siti Resmi (2016), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 9, Jakarta, Salemba Empat.
- Sri Romauli (2017), *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Suatu Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*. Skripsi, Bandung, Universitas Pasundan.
- Syeldila Sandy dan Niki Lukviarman (2015), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur*. JAAI Vol. 19 No. 2: 85-98.
- Theresa Adelina Victoria Surbakti (2012), *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Jurnal Skripsi, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Thomas Sumarsan (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3, Jakarta, PT Indeks Permata Puri Media.
- Tommy Kurniasih dan Maria M. Sari (2013), *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Vol. 18 No. 1.
- Vivi Adeyani Tandean (2015), *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Prosiding Seminar Nasional.
- Waruwu, Yasman Eli (2017), *Pengaruh Struktur Leverage dan Profitabilitas Terhadap Return Saham Pada PT. Adaro Energy dan PT. Indika Energy Tahun 2011-2015*. E-Jurnal Vol.4 No. 4, Bogor, Universitas Pakuan.
- Wirna Yola Agusti (2014), *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2012)*. Jurnal Skripsi, Padang, Universitas Negeri Padang.

Yuliesti Rosalia (2017), *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 3: 890-909.

**Sumber Internet :**

Ditjen Pajak, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses tanggal 1 April 2018.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/03/14/140044626/menteri.susi.ungkap.modus.penghindaran.pajak.perusahaan.perikanan>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>

[www.Ortax.org](http://www.Ortax.org)

**Perundang-Undangan :**

KNKG (2006), Pedoman Umum *Good Corporate Governance*.

UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1

UU No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (2)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Pengambilan Sampel

Daftar Populasi Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang ada di BEI, menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu sebagai berikut:

No	Kode saham	Tahun Listing	Kriteria							Sampel	
			1	2	3	4	5	6	7		
1	AISA	1997	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	ALTO	2012	√	√	√	√	×	√	√	√	×
3	CEKA	1996	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	CLEO	2017	√	×	√	√	√	√	√	√	×
5	DLTA	1984	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	HOKI	2017	√	×	√	√	√	√	√	√	×
7	ICBP	2010	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	INDF	1994	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	MLBI	1994	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	MYOR	1990	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	PSDN	1994	√	√	√	√	×	√	√	√	×
12	ROTI	2010	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	SKBM	1993	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	SKLT	1993	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	STTP	1996	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	ULTJ	1990	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Kriteria tertentu dalam pengambilan sampel sebagai berikut:

8. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016
9. Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya selama tahun 2013-2016.
10. Data yang dilampirkan dalam laporan keuangan lebih lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

11. Laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.
12. Perusahaan yang menyampaikan laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2013-2016.
13. Perusahaan dengan nilai laba positif agar tidak mengakibatkan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) terdistorsi (Kurniasih & Sari, 2013)
14. Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* kurang dari satu, agar tidak membuat masalah dalam estimasi model (Kurniasih dan Sari, 2013).

Sampel terpilih ada 12 Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman sebagai berikut:

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tanggal Listing di BEI
1	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk	12 Februari 1984
2	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7 Oktober 2010
3	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	14 Juli 1994
4	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	4 Juli 1990
5	MLBI	PT Multi Bintang Tbk	17 Januari 1994
6	ROTI	PT Nippon Indosari Tbk	28 Juni 2010
7	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk	5 Januari 1993, Relisting : 28 September 2012
8	SKLT	PT Sekar Laut Tbk	8 September 1993
9	STTP	PT Siantar Top Tbk	16 Desember 1996
10	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera	11 Juni 1997
11	ULTJ	PT Ultrajaya Tbk	9 Juli 1990
12	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	9 Juli 1996

## Lampiran 2 Analisis Determinan

### 1. Perhitungan Komisaris Independen

No	Kode Perusahaan	Tahun	Jumlah Komisaris Independen	Jumlah Seluruh Dewan Komisaris	Komisaris Independen
1	DLTA	2013	2	5	40%
	DLTA	2014	2	5	40%
	DLTA	2015	2	5	40%
	DLTA	2016	2	5	40%
	ICBP	2013	3	7	43%

2	ICBP	2014	3	7	43%
	ICBP	2015	3	6	50%
	ICBP	2016	3	6	50%
3	INDF	2013	3	8	38%
	INDF	2014	3	8	38%
	INDF	2015	3	8	38%
	INDF	2016	3	8	38%
4	MYOR	2013	2	5	40%
	MYOR	2014	2	5	40%
	MYOR	2015	2	5	40%
	MYOR	2016	2	5	40%
5	MLBI	2013	3	7	43%
	MLBI	2014	4	8	50%
	MLBI	2015	4	7	57%
	MLBI	2016	4	7	57%
6	ROTI	2013	1	3	33%
	ROTI	2014	1	3	33%
	ROTI	2015	1	3	33%
	ROTI	2016	1	3	33%
7	SKBM	2013	1	3	33%
	SKBM	2014	1	3	33%
	SKBM	2015	1	3	33%
	SKBM	2016	1	3	33%
8	SKLT	2013	1	3	33%
	SKLT	2014	1	3	33%
	SKLT	2015	1	3	33%
	SKLT	2016	1	3	33%
9	STTP	2013	1	2	50%
	STTP	2014	1	2	50%
	STTP	2015	1	2	50%
	STTP	2016	1	2	50%
10	AISA	2013	2	6	33%
	AISA	2014	2	5	40%
	AISA	2015	2	6	33%
	AISA	2016	2	5	40%
11	ULTJ	2013	1	3	33%
	ULTJ	2014	1	3	33%
	ULTJ	2015	1	3	33%
	ULTJ	2016	1	3	33%
	CEKA	2013	1	3	33%
	CEKA	2014	1	3	33%



12	CEKA	2015	1	3	33%
	CEKA	2016	1	3	33%

## 2. Perhitungan Komite Audit

No	Kode Perusahaan	Tahun	Komite Audit
1	DLTA	2013	300%
	DLTA	2014	300%
	DLTA	2015	300%
	DLTA	2016	300%
2	ICBP	2013	300%
	ICBP	2014	300%
	ICBP	2015	300%
	ICBP	2016	300%
3	INDF	2013	300%
	INDF	2014	300%
	INDF	2015	300%
	INDF	2016	300%
4	MYOR	2013	300%
	MYOR	2014	300%
	MYOR	2015	300%
	MYOR	2016	300%
5	MLBI	2013	300%
	MLBI	2014	300%
	MLBI	2015	300%
	MLBI	2016	300%
6	ROTI	2013	300%
	ROTI	2014	300%
	ROTI	2015	300%
	ROTI	2016	300%
7	SKBM	2013	300%
	SKBM	2014	300%
	SKBM	2015	300%
	SKBM	2016	300%
8	SKLT	2013	300%
	SKLT	2014	300%
	SKLT	2015	300%
	SKLT	2016	300%
	STTP	2013	300%
	STTP	2014	300%

9	STTP	2015	300%
	STTP	2016	300%
10	AISA	2013	300%
	AISA	2014	400%
	AISA	2015	400%
	AISA	2016	400%
11	ULTJ	2013	300%
	ULTJ	2014	300%
	ULTJ	2015	300%
	ULTJ	2016	300%
12	CEKA	2013	300%
	CEKA	2014	300%
	CEKA	2015	300%
	CEKA	2016	300%

3. Perhitungan *Return On Assets* (Dinyatakan dalam jutaan rupiah)

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Total Aset	ROA
1	DLTA	2013	270.498	867.041	31%
	DLTA	2014	288.073	991.947	29%
	DLTA	2015	192.045	1.038.322	18%
	DLTA	2016	254.509	1.197.797	21%
2	ICBP	2013	2.235.040	21.267.470	11%
	ICBP	2014	2.531.681	24.910.211	10%
	ICBP	2015	2.923.148	26.560.624	11%
	ICBP	2016	3.631.301	28.901.948	13%
3	INDF	2013	3.416.635	77.611.416	4%
	INDF	2014	5.146.323	85.938.885	6%
	INDF	2015	3.709.501	91.831.526	4%
	INDF	2016	5.266.906	82.174.515	6%
4	MYOR	2013	1.013.558	9.710.223	10%
	MYOR	2014	409.825	10.297.997	4%
	MYOR	2015	1.250.233	11.342.716	11%
	MYOR	2016	1.388.676	12.922.422	11%
5	MLBI	2013	865.944	1.782.148	49%
	MLBI	2014	794.883	2.231.051	36%
	MLBI	2015	496.909	2.100.853	24%
	MLBI	2016	982.129	2.275.038	43%
	ROTI	2013	158.015	1.822.689	9%
	ROTI	2014	188.578	2.142.894	9%

6	ROTI	2015	263.711	2.706.324	10%
	ROTI	2016	263.392	2.919.641	9%
7	SKBM	2013	58.267	497.653	12%
	SKBM	2014	89.116	649.534	14%
	SKBM	2015	40.151	764.484	5%
	SKBM	2016	22.545	1.001.657	2%
8	SKLT	2013	11.440	301.989	4%
	SKLT	2014	16.481	331.575	5%
	SKLT	2015	18.203	377.111	5%
	SKLT	2016	169.181	568.240	30%
9	STTP	2013	114.437	1.470.059	8%
	STTP	2014	123.636	1.700.204	7%
	STTP	2015	185.705	1.919.568	10%
	STTP	2016	174.177	2.336.411	7%
10	AISA	2013	347.635	5.025.778	7%
	AISA	2014	377.903	7.373.868	5%
	AISA	2015	372.750	9.060.980	4%
	AISA	2016	719.228	9.254.539	8%
11	ULTJ	2013	325.127	2.811.621	12%
	ULTJ	2014	283.361	2.917.084	10%
	ULTJ	2015	523.100	3.539.996	15%
	ULTJ	2016	709.826	4.239.200	17%
12	CEKA	2013	65.069	1.069.627	6%
	CEKA	2014	41.001	1.284.150	3%
	CEKA	2015	106.549	1.485.826	7%
	CEKA	2016	249.697	1.425.964	18%

#### 4. Kompensasi Rugi Fiskal

No	Kode Perusahaan	Tahun	Kompensasi Rugi Fiskal
1	DLTA	2013	0
	DLTA	2014	0
	DLTA	2015	0
	DLTA	2016	0
2	ICBP	2013	0
	ICBP	2014	0
	ICBP	2015	0
	ICBP	2016	0
	INDF	2013	0
	INDF	2014	0

3	INDF	2015	0
	INDF	2016	0
4	MYOR	2013	0
	MYOR	2014	0
	MYOR	2015	0
	MYOR	2016	0
5	MLBI	2013	0
	MLBI	2014	0
	MLBI	2015	0
	MLBI	2016	0
6	ROTI	2013	0
	ROTI	2014	0
	ROTI	2015	0
	ROTI	2016	0
7	SKBM	2013	0
	SKBM	2014	0
	SKBM	2015	0
	SKBM	2016	0
8	SKLT	2013	0
	SKLT	2014	0
	SKLT	2015	0
	SKLT	2016	0
9	STTP	2013	0
	STTP	2014	0
	STTP	2015	0
	STTP	2016	0
10	AISA	2013	1
	AISA	2014	1
	AISA	2015	0
	AISA	2016	0
11	ULTJ	2013	0
	ULTJ	2014	0
	ULTJ	2015	0
	ULTJ	2016	0
12	CEKA	2013	0
	CEKA	2014	0
	CEKA	2015	0
	CEKA	2016	0

5. Perhitungan CETR (Dinyatakan dalam jutaan rupiah)

No	Kode Perusahaan	Tahun	Kas yang Dibayarkan Untuk Pajak	Laba Akuntansi Sebelum Pajak	CETR
1	DLTA	2013	100.077	358.396	0,28
	DLTA	2014	101.009	379.519	0,27
	DLTA	2015	69.234	250.198	0,28
	DLTA	2016	85.427	327.048	0,26
2	ICBP	2013	916.276	2.966.990	0,31
	ICBP	2014	1.008.722	3.388.725	0,30
	ICBP	2015	1.189.923	4.009.634	0,30
	ICBP	2016	1.530.642	4.989.254	0,31
3	INDF	2013	1.972.114	4.000.751	0,49
	INDF	2014	2.398.644	6.340.185	0,38
	INDF	2015	2.333.641	4.962.084	0,47
	INDF	2016	2.678.358	7.385.228	0,36
4	MYOR	2013	345.516	1.356.073	0,25
	MYOR	2014	643.729	529.701	1,22
	MYOR	2015	207.517	1.640.495	0,13
	MYOR	2016	366.125	1.845.683	0,20
5	MLBI	2013	345.562	1.576.945	0,22
	MLBI	2014	339.888	1.078.378	0,32
	MLBI	2015	182.909	675.572	0,27
	MLBI	2016	252.522	1.320.186	0,19
6	ROTI	2013	55.774	210.805	0,26
	ROTI	2014	48.105	252.763	0,19
	ROTI	2015	76.292	378.252	0,20
	ROTI	2016	101.020	369.417	0,27
7	SKBM	2013	8.087.760	78.305.046	0,10
	SKBM	2014	33.848.985	109.761.131	0,31
	SKBM	2015	24.432.812	53.629.854	0,46
	SKBM	2016	17.322.736	30.809.950	0,56
8	SKLT	2013	5.857.453	16.597.786	0,35
	SKLT	2014	6.541.476	23.544.037	0,28
	SKLT	2015	15.451.631	27.376.238	0,56
	SKLT	2016	8.026.883	25.166.207	0,32
	STTP	2013	31.267.408	142.799.076	0,22

9	STTP	2014	53.340.816	167.765.042	0,32
	STTP	2015	51.222.194	232.005.399	0,22
	STTP	2016	45.345.049	217.746.309	0,21
10	AISA	2013	25.685	449.573	0,06
	AISA	2014	36.170	484.592	0,07
	AISA	2015	67.000	500.435	0,13
	AISA	2016	60.123	898.431	0,07
11	ULTJ	2013	170.437	436.720	0,39
	ULTJ	2014	125.695	375.357	0,33
	ULTJ	2015	111.720	700.675	0,16
	ULTJ	2016	253.030	932.483	0,27
12	CEKA	2013	23.524	86.533	0,27
	CEKA	2014	19.721	57.073	0,35
	CEKA	2015	27.930	142.271	0,20
	CEKA	2016	71.741	285.828	0,25